



LMCK

(LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA)



TRIWULAN I | 2025

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III BANGKA BELITUNG
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI



**Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III
Bangka Belitung Tahun 2025**

**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

**Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III
Bangka Belitung
Tahun 2025**

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Muhammad Zinedine Dwi Handiya, A.Md.Tra.	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi	09/04/2025	
2.	Diperiksa	1. Denny Megantoro, A.Md. LLASDP	Penelaah Teknis Kebijakan	09/04/2025	
		2. Wiratno, S.SiT., M.M.	Ketua Tim Substansi Tata Usaha	09/04/2025	
3.	Disetujui	Pitra Setiawan, S.IP., M.Sc.	Kepala Balai Pengelola Transportasi Kelas III Bangka Belitung	09/04/2025	



• KATA

PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bangka Belitung merupakan organisasi pemerintah yang mengemban amanah untuk memfasilitasi dan mendukung mobilitas masyarakat melalui satuan pelayanan transportasi darat.

Sebagai Instansi Publik, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bangka Belitung memiliki tugas dan fungsi yang akuntabel dan transparan. Laporan Monitoring Capaian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bangka Belitung merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bangka Belitung yang didalamnya menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kinerja tersebut dan realisasi anggaran.

Penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bangka Belitung mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun isi dari laporan ini mencakup Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Pengukuran Kinerja Triwulan I Tahun 2025 serta tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran terhadap Pencapaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025.

Kami berharap Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III ini dapat memberikan penjelasan pertanggungjawaban terhadap berbagai pelaksanaan kegiatan serta dapat memberikan manfaat secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun - tahun mendatang.

Pangkal Pinang, 10 April 2025

Kepala Balai,

Ttd.

Pitra Setiawan, S.IP., M.Sc.
NIP 19790923 200604 1 001



• RINGKASAN EKSEKUTIF

RINGKASAN EKSEKUTIF

Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menjalankan kepemimpinannya melalui Kabinet Merah Putih periode Tahun 2025-2029 mengusung Visi “Bersama Indonesia Maju, menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut diterjemahkan lebih lanjut ke dalam 8 (delapan) Misi Asta Cita yang tertuang dalam RPJMN periode 2025-2029. Pencapaian Visi Kabinet Kerja tersebut dapat terwujud apabila segenap jajaran pemerintahan menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat dan optimal, yang direfleksikan dari pencapaian kinerja dalam mendukung agenda prioritas nasional.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bangka Belitung Tahun 2025-2029, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bangka Belitung telah menetapkan Visi yang merupakan pengejawantahan dari Visi Kementerian Perhubungan 2025-2029 dalam rangka mendukung terwujudnya Visi Presiden Republik Indonesia 2025-2029, yaitu:

Perhubungan Darat yang andal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Bersama Indonesia Maju, menuju Indonesia Emas 2045. Renstra memuat 2 (dua) tujuan Pembangunan sub sektor Perhubungan Darat, yakni:

1. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Transportasi Darat;
2. Meningkatkan Dukungan Sumber Daya dan Kelembagaan di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat.

Dari tujuan di atas, dapat dijabarkan secara konkret ke dalam Sasaran Kegiatan. Setiap sasaran tersebut disertai dengan ukuran sebagai alat untuk mengetahui pencapaian sasaran dimaksud. Pada tahun 2025, ditetapkan 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK) dan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), beserta targetnya.

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Program (IKK) dan evaluasi kinerja Triwulan I tahun 2025, secara keseluruhan kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bangka Belitung sudah baik. Dari 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK), Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bangka Belitung Triwulan I Tahun 2025, terdapat 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Kegiatan kurang dari 100% ($0\% \leq \text{IKK} < 100\%$). Adapun rincian capaian untuk setiap IKK pada Triwulan I Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Presentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan terealisasi sebesar 10% (target 100%);
2. Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda terealisasi sebesar 100% (target 2 lokasi);
3. Presentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan terealisasi sebesar 5 % (target 100%);
4. Jumlah Pelabuhan yang dibangun terealisasi sebesar 0% (target 2 lokasi);
5. Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP terealisasi sebesar 15 % (target 100%);
6. Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi, Pelabuhan yang beroperasi terealisasi sebesar 100% (target 4 Lokasi)
7. Presentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Dengan Kondisi Ideal terealisasi sebesar 0% (target 100%);
8. Jumlah Masyarakat yang Tersosialisasi tentang Keselamatan Transportasi Jalan terealisasi sebesar 0% (target 300 orang);
9. Presentase Standarisasi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar 0% (target 90%)
10. Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat terealisasi sebesar 20% (target nilai 95);
11. Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat terealisasi sebesar 29% (target nilai 95).

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
KATA PENGANTAR.....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN.....	2
I.1 Latar Belakang.....	2
I.2 Tugas dan Fungsi.....	2
I.2.1 Bagan Struktur Organisasi	3
I.3 Sumber Daya Manusia.....	8
I.4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan.....	9
I.4.1 Potensi dan Permasalahan	9
I.4.2 Isu Strategis.....	11
I.5 Sistematika Laporan.....	12
I.6 Uraian Singkat Perencanaan Strategis.....	16
I.7 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	18
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA	21
II.1 Tahapan Pengukuran Kinerja.....	21
II.2 Pengukuran Capaian.....	21
II.2.1 Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi.....	25
II.2.2 Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	39
II.2.3 Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	46
II.2.4 Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat.....	53
II.2.5 Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	57
II.3 Realisasi Anggaran.....	60
II.3.1 Alokasi Anggaran Tahun 2025	60
II.3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2024	65



II.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	69
II.5 Hambatan dan Kendala.....	71
BAB III PENUTUP	73
III.1 Ringkasan Capaian.....	73
III.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi, dan Unit Kerja Penanggung Jawab	75

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Komposisi SDM Pegawai BPTD Kelas III Bangka Belitung	8
Tabel I.2 Uraian Singkat Perencanaan Strategis.....	17
Tabel I.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	18
Tabel II.1 Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bangka Belitung Tahun 2025	24
Tabel II.2 Capaian Realisasi Kinerja Kegiatan Keperintisan Angkutan Jalan Triwulan I Tahun 2025	28
Tabel II.3 Capaian Realisasi Kinerja Kegiatan Keperintisan Angkutan Penyeberangan Triwulan I Tahun 2025	35
Tabel II.4 Capaian Realisasi Kinerja Kegiatan Persentase perlengkapan jalan telah terpasang dengan kondisi ideal Triwulan I Tahun 2025	48
Tabel II.5 Tabel Rincian per Sumber Dana Pagu Awal Tahun 2025.....	60
Tabel II.6 Tabel Rincian per Jenis Belanja Pagu Awal Tahun 2024.....	60
Tabel II.7 Rincian Revisi Per Sumber Dana T.A.2025.....	61
Tabel II.8 Rincian Revisi Per Jenis Belanja T.A.2025	61
Tabel II.9 Rincian Relokasi Per Sumber Dana dan Perjenis Belanja T.A.2025	62
Tabel II.10 Rincian Program-program Kegiatan DIPA T.A.205	63
Tabel II.11 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023-2025	64
Tabel II.12 Kegiatan Program yang ada dalam DIPA 2024.....	65
Tabel II.13 Realisasi Anggaran Perjenis Belanja Triwulan I Tahun 2025	66
Tabel II.14 Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Triwulan I 2025.....	67
Tabel II.15 Analisa Sisa Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2025	68
Tabel II.16 Analisa Sisa Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2025	68
Tabel II.14 Rincian Proyeksi Sisa Anggaran Tahun 2025	68
Tabel II.15. Efisiensi Anggaran	69
Tabel III.1 Hasil Evaluasi, Rekomendasi, dan Unit Kerja Penanggung Jawab	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Bagan Struktur Organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bangka Belitung	6
Gambar II.1 Grafik Capaian IKK 1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	26
Gambar II.2 Grafik Capaian IKK 1.2 Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda	30
Gambar II.3 Grafik Pencapaian IKK Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	33
Gambar II.4 Grafik Capaian Kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi.....	37
Gambar II.5 Grafik Capaian IKK Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di pelabuhan SDP	40
Gambar II.6 Grafik Capaian Kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi.....	44
Gambar II.7 Grafik IKK Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal.....	46
Gambar II.8 Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan.....	50
Gambar II.9 Grafik Capaian IKK Capaian kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat.....	54
Gambar II.10 Grafik Capaian IKK Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat.....	57
Gambar II.11 Grafik Perbandingan Pagu Akhir dan Realisasi Anggaran Tahun 2023- 2025	64



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dituntut untuk menyelenggarakan Sistem Pemerintahan dengan Prudent, Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien sesuai dengan prinsip - prinsip *Good Governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga itu diperlukan Akuntabilitas Publik sebagai landasan bagi proses penyelenggaraanya.

I.2 Tugas dan Fungsi

BPTD Kelas III Bangka Belitung yang terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bangka Belitung adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat dengan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bangka Belitung mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelabuhan sungai, danau, penyeberangan, pengendalian dan pengawasan keselamatan sarana, prasarana, lalu lintas dan angkutan jalan, serta keselamatan dan keamanan pelayaran angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Provinsi Bangka Belitung menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. Pelaksanaan pengelolaan pelabuhan sungai, danau, penyeberangan;

3. Pelaksanaan pengendalian keselamatan sarana dan angkutan jalan, keselamatan dan keamanan pelayaran sungai, danau dan penyeberangan, serta melaksanakan kegiatan keperintisan;
4. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengendalian lalu lintas jalan, sungai, danau dan penyeberangan; pelaksanaan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan;
5. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, sumber daya manusia, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat; dan;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

I.2.1 Bagan Struktur Organisasi

Tahun 2016 UPT Ditjen Darat sebelumnya, yaitu: Balai LLAJSDP, KOPP, Pelabuhan Penyeberangan dilebur dan disempurnakan nomenklaturnya untuk mengakomodir Pengelola Terminal Tipe A dan UPPKB menjadi 33 UPT Balai Pengelola Transportasi Darat. Dengan dasar hukum c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat..

Tipologi (BPTD) terdiri atas:

1. BPTD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan terminal tipe A, terminal untuk barang umum, unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, dan pelabuhan sungai, danau, penyeberangan, pengendalian, dan pengawasan keselamatan sarana, prasarana, lalu lintas dan angkutan jalan, serta keselamatan dan keamanan pelayaran angkutan sungai, danau, dan penyeberangan disebut BPTD Kelas I;
2. BPTD yang melaksanakan pengelolaan transportasi darat pada wilayah dengan karakteristik daratan yang terdapat pelayanan transportasi jalan, serta pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan perintis, yang selanjutnya disebut BPTD Kelas II;
3. BPTD yang melaksanakan pengelolaan transportasi darat pada wilayah dengan karakteristik kepulauan yang terdapat pelayanan transportasi jalan, serta pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan komersial dan perintis, yang selanjutnya disebut BPTD Kelas III.

Susunan Organisasi BPTD Kelas I terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Prasarana;
- c. Bidang Sarana dan Angkutan;
- d. Seksi Lalu Lintas dan Pengawasan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi BPTD Kelas II terdiri atas:

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan;
- c. Seksi Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- d. Seksi Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Perintis; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

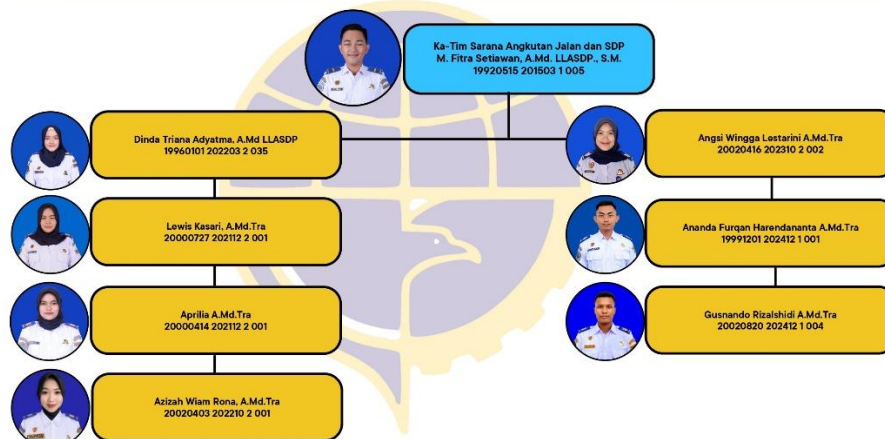
Susunan Organisasi BPTD Kelas III terdiri atas:

- a. Substansi Tata Usaha;
- b. Substansi Prasaran Jalan dan SDP;
- c. Substansi Sarana Jalan dan SDP;
- d. Substansi Lalin Angkutan Jalan dan SDP.

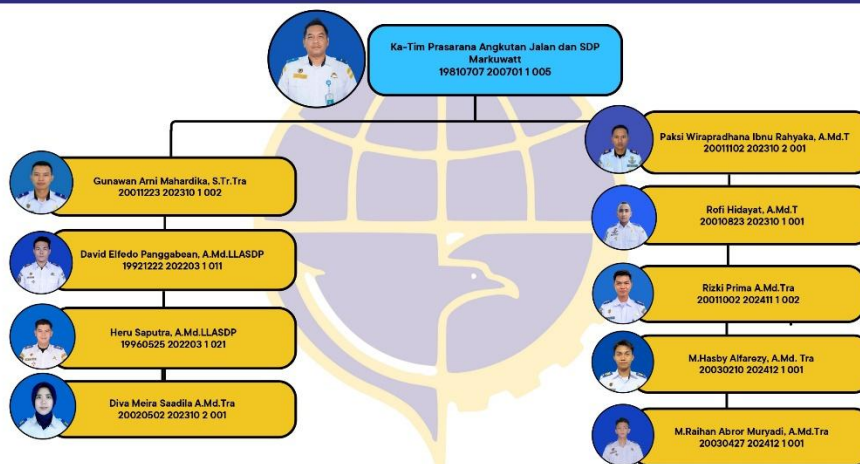
Bagan Struktur Organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bangka Belitung



Struktur Organisasi Tim Sarana Angkutan Jalan dan SDP



Struktur Organisasi Tim Prasarana Angkutan Jalan dan SDP



Gambar I.1 Bagan Struktur Organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bangka Belitung

Tugas dan tanggung jawab masing-masing substansi adalah sebagai berikut:

a. Subtansi Tata Usaha

Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, dan laporan evaluasi kinerja, pengelolaan urusan keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, serta pelaporan Sistem Akutansi Instansi, urusan sumber daya manusia, hukum, hubungan masyarakat, persuratan, kearsipan, dan dokumentasi, pelayanan informasi publik, perlengkapan, rumah tangga, serta evaluasi dan pelaporan.

b. Substansi Lalu Lintas Jalan dan SDP

Melaksanakan manajemen rekayasa lalu lintas jalan untuk jaringan jalan nasional, penyediaan, pengoperasian, dan pemeliharaan perlengkapan jalan, rambu sungai dan danau, sarana bantu navigasi pelayaran, dan sistem informasi manajemen lalu lintas sungai, danau, dan penyeberangan, pengerukan dan reklamasi di kolam pelabuhan penyeberangan dan alur sungai dan danau, pemberian rekomendasi laik fungsi jalan nasional non-tol, pemberian bantuan teknis perlengkapan jalan, halte, dan rambu sungai danau, pengamatan dan pemantauan perusahaan angkutan jalan, pelabuhan dan penyelenggara pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan komersil, operator kapal sungai, danau dan penyeberangan, kendaraan bermotor di jalan, tarif angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan pemberian subsidi angkutan jalan, persetujuan teknis analisis dampak lalu lintas, pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan, pemenuhan kelaiklautan kapal sungai, danau, dan penyeberangan, ketepatan waktu pelayanan, dan pemberian subsidi angkutan sungai, danau dan penyeberangan, sarana bantu navigasi pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan, rambu, alur, dan halte sungai danau, kegiatan pengerukan dan reklamasi di kolam pelabuhan penyeberangan dan alur sungai danau, dan pemanfaatan bantuan teknis, pelaksanaan kegiatan kesyahbandaran pada pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundangundangan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan.

c. Substansi Prasarana Jalan dan SDP

Melaksanakan pembangunan, pengembangan, pelayanan jasa, dan pengoperasian terminal tipe A, terminal barang untuk umum, dan unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, serta bantuan teknis fasilitas pendukung dan integrasi moda dan pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan.

d. Substansi Sarana Jalan dan SDP

Melaksanakan pemeriksaan dan sertifikasi kelaiklautan kapal, analisis trayek angkutan jalan antar kota antar provinsi dan angkutan jalan yang disubsidi oleh pemerintah pusat, penetapan jadwal operasi, pemberian subsidi angkutan jalan dan pelayaran perintis sungai, danau, dan penyeberangan, serta bantuan teknis penyediaan sarana jalan, sungai, danau, dan penyeberangan.

I.3 Sumber Daya Manusia

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bangka Belitung menaungi sebanyak 68 Pegawai dengan rincian sebagai berikut:

SDM PNS BPTD Sebanyak : 47 Orang
 SDM PPNP BPTD Sebanyak : 18 Orang
 SDM *Outsourcing* BPTD Sebanyak : 30 Orang
 SDM CASN Sebanyak : 30 Orang

Tabel I.1 Komposisi SDM Pegawai BPTD Kelas III Bangka Belitung

No	NAMA	PNS	CASN	PPNP	<i>Outsourcing</i>	TOTAL
1	KANTOR INDUK BPTD KELAS II BANGKA BELITUNG	32	11	4	20	47
2	SATPEL PELABUHAN TANJUNG KALIAN	6	7	9	5	27
3	SATPEL PELABUHAN SADAI	3	5	3	2	13
4	SATPEL PELABUHAN TANJUNG RU	4	3	1	1	9
5	SATPEL PELABUHAN TANJUNG NYATO	2	4	1	2	9
JUMLAH		25	21	18	4	105

I.4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan

I.4.1 Potensi dan Permasalahan

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia, Tema dan Agenda Pembangunan Tahun 2025-2029 terdapat beberapa permasalahan yang dibagi menjadi 8 (delapan) aspek antara lain:

1. Aspek teknis

- Perubahan standar/kebijakan/arahan pimpinan
- Kesiapan dokumen perencanaan/data dukung
- Kesiapan dokumen lingkungan
- Kesiapan dokumen pemda
- Kondisi/kesiapan sarana prasarana pendukung

2. Aspek social

- Konflik kepentingan dengan Masyarakat
- Vandalisme/perusakan oleh pihak tertentu
- Dampak sosial/keamanan

3. Aspek pendanaan

- Kekurangan/tidak ada alokasi anggaran
- Pengalihan/relokasi jenis kegiatan (P3D)
- Penghematan anggaran/self blocking
- Kebijakan pencatatan aset yang diserah terimakan

4. Aspek koordinasi

- Izin/rekomendasi dari K/L terkait
- Duplikasi kegiatan dengan K/L lain
- Perlunya kesepakatan dengan K/L terkait
- Dukungan stakeholders

5. Aspek Manajemen Pelaksanaan Kegiatan

- Batal/gagal lelang
- Keterbatasan waktu pelaksanaan
- Status lahan/hambatan pembebasan lahan
- Hambatan/penyesuaian kondisi lapangan

6. Aspek Hukum

- Terdapat kegiatan yang tidak memiliki dasar hukum
- Proses penetapan regulasi yang belum terselesaikan di Setneg/Biro Hukum

7. Aspek SDM dan Kelembagaan

- Penerapan SAKIP yang belum optimal
- Hambatan pelaksanaan diklat dan sertifikasi kompetensi
- Kekurangan SDM teknis operasional di lapangan
- Terjadinya reorganisasi Ditjen Hubdat di Th 2016, 2017

8. Aspek Data dan Informasi

- Tidak dimilikinya sistem pengukuran data kinerja
- Belum berjalannya kegiatan survey kinerja
- Tidak tersedia formulasi perhitungan kinerja

Permasalahan tersebut kemudian dirumuskan menjadi dua, yakni:

1. Permasalahan kinerja dan dampak pelayanan transportasi darat (*public interest*):

- Dukungan terhadap prioritas pembangunan nasional (KEK/KI, KSPN, 3TP/DTPK, IKN, dll)
- Relevansi isu strategis lintas sektoral (biaya logistic, perubahan iklim, energi, kebencanaan, gender, dll)
- Konektivitas dan keterpaduan antarmoda transportasi (termasuk dukungan terhadap tol laut)
- Dampak teknologi: ASK (on-line), kendaraan Listrik drone
- Tingkat pelayanan (pada jalur dan simpul utama, termasuk penyelenggaraan angkutan hari libur nasional)
- Transportasi perkotaan
- Keselamatan dan keamanan transportasi darat (LLAJ dan TASDP)
- Penyelenggaraan angkutan barang (termasuk ODOL)
- Revitalisasi AKAP (termasuk pengelolaan terminal terminal tipe A).

2. Permasalahan penyelenggaraan bidang transportasi darat (*Institution Interest*)

- Efektivitas perumusan dan pelaksanaan regulasi dan kebijakan (penetapan kebijakan, NSPK, dan dokumen teknis, berikut dengan diseminasinya (melalui bimtek) serta pengendalian pelaksanaannya)
- Kecukupan dan keandalan penyediaan sarana dan prasarana transportasi darat
- Penyediaan SDM transportasi darat (kuantitas, kualitas, penempatan)
- Skema pendanaan (KPBU, PINA, CSR)
- Penguatan kelembagaan (internal dan eksternal)
- Penerapan dan pemanfaatan teknologi dan informasi.

Adapun inti permasalahan yang berada di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bangka Belitung, meliputi:

1. Simpul-simpul transportasi belum terbangun;
2. Pengembangan kota semakin meningkat;
3. Kurangnya SDM yang memiliki kualifikasi.

I.4.2 Isu Strategis

Isu Strategis perhubungan darat tahun 2020-2024 yakni gunung es (*iceberg of issues*)

Isu strategis BPTD Kelas III Bangka Belitung

1. Pengembangan terminal
2. Pengembangan pelabuhan SDP
3. Pengembangan UPPKB
4. Penataan angkutan barang dan orang.

I.5 Sistematika Laporan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

I.2 Tugas Pokok dan Fungsi

I.2.1 Bagan Struktur Organisasi

I.3 Sumber Daya Manusia

I.4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan

I.5 Sistematika Laporan

I.6 Uraian Singkat Perencanaan Strategis

I.6.1 Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024

I.7 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2024

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

II.1 Tahapan Pengukuran Kinerja

II.2 Pengukuran Capaian Kinerja

II.2.1 SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi

A.1 IKK 1.1 Presentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan

A.1.1. Definisi Indikator Kinerja

A.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

A.1.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

A.1.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang.

A.2 IKK 1.2 Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda

A.2.1. Definisi Indikator Kinerja

A.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

- A.2.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- A.2.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang.
- A.3 IKK 1.5 **Presentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan**
 - A.3.1. Definisi Indikator Kinerja
 - A.3.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
 - A.3.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - A.3.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang.
- A.4 IKK 1.6 **Jumlah Pelabuhan SDP yang dibangun**
 - A.4.1. Definisi Indikator Kinerja
 - A.4.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
 - A.4.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - A.4.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang.

II.2.2 SK2 Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat

- B.1 IKK 2.3 **Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP**
 - B.1.1. Definisi Indikator Kinerja
 - B.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
 - B.1.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - B.1.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang.
- B.2 IKK 2.6 **Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi**
 - B.2.1. Definisi Indikator Kinerja
 - B.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
 - B.2.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- B.2.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.3 SK4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat

C.1 IKK 4.1 Presentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal

- C.1.1. Definisi Indikator Kinerja
- C.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- C.1.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- C.1.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang.

C.2 IKK 4.5 Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan.

- C.2.1. Definisi Indikator Kinerja
- C.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- C.2.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- C.2.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang.

C.3 IKK 4.7a Persentase Standarisasi Pengujian Kendaraan Bermotor.

- C.3.1. Definisi Indikator Kinerja
- C.3.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- C.3.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- C.3.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang.

II.2.4 SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

D.1 IKK 5.1 Kualitas Penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat

- D.1.1. Definisi Indikator Kinerja
- D.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

- D.1.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- D.1.4. Upaya untuk meningkatkan6 capaian di masa yang akan datang.

II.2.5 SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat

Akuntabel

E.1 IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

- E.1.1. Definisi Indikator Kinerja
- E.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- E.1.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- E.1.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang.

II.3 Realisasi Anggaran

II 3.1. Alokasi Anggaran Tahun 2025

- Pagu Anggaran
- Rincian Per Sumber Dana Tahun 2025
- Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2025
- Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran
- Revisi Anggaran Tahun 2025
- Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2025
- Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun 2025
- Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2025
- Rincian Realokasi Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2025

II.3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2024

- Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2024
- Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2024
- Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2024
- Analisis Dana Yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja

II.3.3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

II.3.4. Hambatan dan Kendala.

BAB III PENUTUP

III.1 Penutup

III.1.1 Ringkasan Capaian

III.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

Lampiran

1. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2025;
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
3. Rencana Aksi Tahun 2025;
4. Monitoring Rencana Aksi Tahun 2025;
5. Lain - lain yang dianggap perlu

I.6 Uraian Singkat Perencanaan Strategis

Rencana Strategis BPTD Kelas III Bangka Belitung Tahun 2025 - 2029 merupakan rencana yang disusun untuk memberikan gambaran tentang Visi, Misi, Tujuan Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program BPTD Kelas III Bangka Belitung dalam kurun waktu 2025 - 2029 sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan 2025 - 2029 agar bersinergi dan mempunyai kesatuan arah dan tujuan pengembangan Ditjen Hubdat.

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, BPTD Kelas III Bangka Belitung adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat.

Guna mencapai sasaran, maka sebagai acuan ukuran kinerja ditetapkan indikator kinerja program BPTD Kelas III Bangka Belitung sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis

BPTD Kelas III Bangka Belitung Tahun 2025 - 2029, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel I.2 Uraian Singkat Perencanaan Strategis

NO.	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
1	SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	%	80
			IKK1.2	Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda	Lokasi	2
			IKK1.5	Presentase Pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
			IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang dibangun	Lokasi	2
NO.	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
2	SK2	Meningkatnya Pelayanan transportasi darat	IKK2.3	Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP	%	100
			IKK2.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4
3	SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK4.1	Presentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
			IKK4.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1000
			IKK4.7a	Persentase Standarisasi Pengujian Kendaraan Bermotor	%	90
4	SK5	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas Penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	95
5	SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	95

I.7 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja BPTD Kelas III Bangka Belitung merupakan kontrak kinerja antara Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan Menteri Perhubungan dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2020 dan merupakan indikator yang didukung melalui pendanaan APBN. Hal ini disebabkan adanya kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran BPTD Kelas III Bangka Belitung melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat dengan Total Anggaran Rp 135.712.611.000,- adalah sebagai berikut:

Tabel I.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO.	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
1	SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	%	80
			IKK1.2	Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda	Lokasi	2
			IKK1.5	Presentase Pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
			IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang dibangun	Lokasi	2
NO.	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
2	SK2	Meningkatnya Pelayanan transportasi darat	IKK2.3	Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP	%	100
			IKK2.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4

3	SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK4.1	Presentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
			IKK4.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1000
			IKK4.7a	Persentase Standarisasi Pengujian Kendaraan Bermotor	%	90
4	SK5	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas Penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	95
5	SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	95

No	KEGIATAN	ANGGARAN	
1	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp	99.958.246.000
2	Pelayanan Transportasi Darat	Rp	1.095.240.000
3	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp	15.974.020.000
4	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp	4.348.153.000
5	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp	6.479.664.000
6	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	Rp	7.857.288.000



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

II.1 Tahapan Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas Kinerja adalah pencapaian kinerja suatu Instansi pemerintah dikaitkan dengan sejauh mana organisasi tersebut telah melakukan upaya - upaya Strategis dan Operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka pemenuhan Visi dan Misinya.

II.2 Pengukuran Capaian

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja.

Tahapan Pengukuran Kinerja dilakukan melalui sistem aplikasi berbasis web *e-performance* yang menyediakan fasilitas *Inputting*, *updating* dan *monitoring* pengukuran kinerja per bulan maupun triwulan yang dapat dimanfaatkan unit kerja Eselon I, II dan III mandiri di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dengan alamat <http://www.eperformance.dephub.go.id>, dimana dengan menggunakan sistem aplikasi ini pelaksanaan monitoring dapat dilakukan secara intensif sehingga penyelenggaraan manajemen kinerja organisasi menjadi optimal.

Guna memudahkan penggunaan sistem aplikasi tersebut, terus dilakukan upaya penyempurnaan atas sistem aplikasi tersebut agar para operator pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat lebih mudah menggunakan sistem aplikasi, di samping itu diupayakan pula bagi setiap operator yang bertugas menjalankan/melaksanakan sistem aplikasi dapat diberikan *reward* atas hasil kerjanya dan penilaian unit kerja masing - masing.

Melalui penggunaan aplikasi ini dapat dijadikan evaluasi rutin atas capaian kinerja secara periodik tiap bulannya, di mana hal ini menjadi salah satu materi yang direkomendasikan Tim Evaluator SAKIP dari Kementerian PAN dan RB, dimana gilirannya dapat meningkatkan nilai capaian hasil evaluasi SAKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dimasa mendatang.

Metode Pengukuran

Dalam menentukan nilai pengukuran kinerja, hasil pengukuran kinerja dimaksud disampaikan dalam bentuk Persentase. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran kinerja Persentase pencapaian untuk Indikator Kinerja Kegiatan adalah sebagai berikut:

Prosentase Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah ditetapkan cara perhitungan Persentase capaian kinerja sebagai berikut:

- a. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- b. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin buruk, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bangka Belitung Tahun 2025

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran terhadap realisasi kinerja dan juga analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Pengukuran capaian kinerja meliputi:

1. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dan analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan, serta alternatif solusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Program Tahun 2025;
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2025 Dalam Draft Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bangka Belitung Tahun 2025-2029.

Analisis dan Evaluasi kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bangka Belitung, diperoleh berdasarkan data realisasi masing - masing indikator kinerja. Untuk mewujudkan 5 (lima) tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bangka Belitung 2025 - 2029, bermuara pada terwujudnya 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK) yang ingin dicapai pada periode 2025 - 2029.



Tabel II.1 Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bangka Belitung Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	TARGET	Q1		
				T	R	C
SK 1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi					28.75%
IKK 1.1	Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan	%	100	100	10	10%
IKK 1.2	Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda	lokasi	2	2	2	100%
IKK 1.5	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan	%	100	100	5	5%
IKK 1.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang dibangun	lokasi	2	2	0	0%
SK 2	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat					57,5%
IKK 2.3	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	%	100	100	15	15
IKK 2.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi	lokasi	4	4	4	100%
SK 4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat					0
IKK 4.1	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	%	100	100	0	0
IKK 4.3	Jumlah Masyarakat yang Tersosialisasi tentang Keselamatan Transportasi Jalan	orang	300	300	0	0
IKK 4.5	Persentase Standarisasi Pengujian Kendaraan Bermotor	%	90	90	0	0
SK 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat					14%
IKK 5.1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	nilai	95	95	14	14%
SK 6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel					29%
IKK 6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	nilai	95	95	29	29%
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran Kegiatan						25.85%

Rata-Rata Persentase Capaian Indikator Kinerja Program	
---	--

Jumlah Indikator Kinerja Program yang lebih besar atau sama dengan 100% (IKP≥100%)	2
Jumlah Indikator Kinerja Program kurang dari 100% (0%≤IKP<100%)	9

Selama Tahun 2025, ada 5 Sasaran Kegiatan (SK) dan di dalamnya ada 11 IKK Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bangka Belitung. Penjelasan capaian IKK untuk setiap Sasaran Kegiatan adalah sebagai berikut:

II.2.1 Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bangka Belitung merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian Perhubungan yang mempunyai peran strategis dalam mendorong pemangku kepentingan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan di bidang transportasi darat yang dirumuskan dalam RPJMN dan Draft Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat maupun pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bangka Belitung Tahun 2025-2029. Kegiatan pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bangka Belitung mengawal dan memastikan program - program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dan dilaksanakan, memiliki daya saing dan nilai tambah serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga hasil pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bangka Belitung dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam IKK membangun negara sesuai tugas dan wewenangnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan negara. Untuk mendukung kebijakan tersebut strategi yang dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bangka Belitung adalah dengan mewujudkan pelayanan transportasi darat yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas dan peningkatan angkutan perkotaan.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1 diukur melalui 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1. IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan
2. IKK 1.2 Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda
3. IKK 1.5 Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan
4. IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP yang dibangun.

IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan

a.1 Definisi Indikator

Pelaksanaan keperintisan angkutan jalan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah - daerah yang saat ini belum terjangkau untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut.

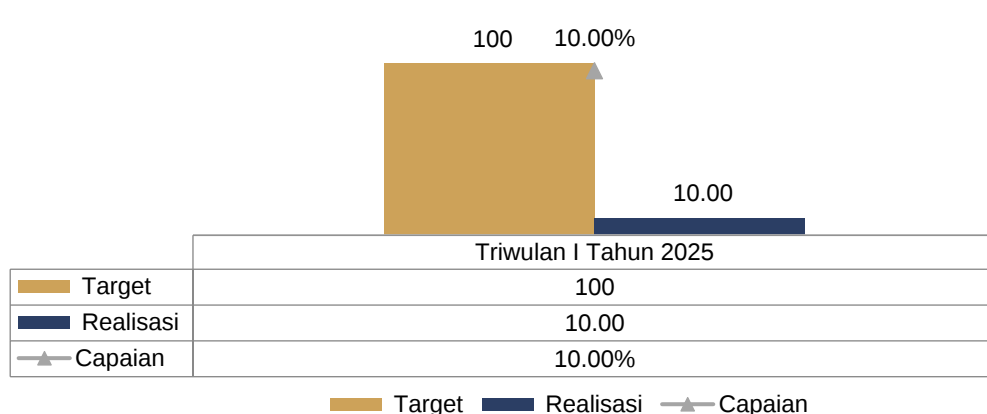
Capaian Kinerja Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan dihitung berdasarkan perbandingan realisasi fisik dan target yang telah ditetapkan.

Untuk menghitung Indikator Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan} = \frac{\text{Jumlah RIT Realisasi}}{\text{Jumlah RIT Target}} \times 100\%$$

a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bangka Belitung Tahun 2025

Realisasi kinerja persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan Triwulan I tahun 2025 sebesar 10% jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 100%, maka capaian kinerja mencapai 10%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.1** Grafik Pencapaian IKK Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan.



Gambar II.1 Grafik Capaian IKK 1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan

a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Sesuai Surat keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP – DRJD 5958 Tahun 2024 tanggal 31 Oktober 2024 tentang Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2025, sebanyak 7 trayek ditetapkan untuk dilayani Angkutan Jalan Perintis.

- **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Pada Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan terhadap konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi target 100% yang diperoleh dari capaian terhadap PK di tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan dan memperhatikan beberapa aspek kondisi trayek yang ditentukan seperti kondisi lalu lintas, akses jalan dan jarak tempuh di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

- **Faktor Keberhasilan**

Adapun faktor keberhasilan tercapainya Indikator persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional antara lain:

1. Dipengaruhi oleh komitmen antara Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bangka Belitung dan pemerintah daerah dalam kegiatan pengembangan dan peningkatan pelayanan keperintisan angkutan jalan;
2. Masih diperlukannya angkutan keperintisan didaerah yang belum terjangkau oleh angkutan umum;
3. Angkutan keperintisan menjadi salah satu pilih transportasi yang murah dan efisien.

- **Faktor Kegagalan**

Adapun faktor kegagalan terhadap indikator persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional antara lain:

1. Kurangnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan perintis yang telah disediakan;
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang adanya angkutan keperintisan;
3. Kurangnya aktivitas sosialisasi dari pihak operator untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa adanya keperintisan angkutan jalan.

- **Realisasi Kinerja**

Realisasi Indikator Kinerja Persentase pelaksanaan keprintisan angkutan jalan Triwulan I tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$\text{Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan} = \frac{\text{Jumlah RIT Realisasi}}{\text{Jumlah RIT Target}} \times 100\%$$

- **Capaian Kinerja**

Capaian Indikator Kinerja Persentase pelaksanaan keprintisan angkutan jalan Triwulan I tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu tercapainya target perjalanan pulang pergi (rit) dan kebermanfaatan dalam satu tahun pelayanan. Capaian rit untuk masing-masing trayek dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.2 Capaian Realisasi Kinerja Kegiatan Keperintisan Angkutan Jalan Triwulan I Tahun 2025

No	Rincian Trayek	Volume	Satuan	Total Capaian s.d Maret
1	Pangkal Pinang- Tanjung Pura	300	Rit	30
2	Pangkal pinang- Pusuk	300	Rit	30
3	Pangkalpinang- Keretak - Koba	300	Rit	30
4	Pangkal Pinang - Kundi	300	Rit	30
5	Pangkal Pinang - Sebagin	300	Rit	30
6	Tanjung Nyato – Selat Nasik - Gual	300	Rit	30
7	Tanjung Pandan – Manggar (Via Dendang)	600	Rit	60
Total		2400	Rit	240

Sumber: Data Produksi Damri bulan Juni Tahun 2025

$$\% \text{ Capaian} = \frac{240}{2400} \times 100\% = 10\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran terkait persentase pelaksanaan keperintisan Angkutan Jalan Tahun 2025 yaitu memiliki target keuangan senilai Rp. 6.246.193.000 dengan realisasi di Triwulan I Tahun 2024 Rp. 0 atau mencapai 0%.

a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian yang akan datang yaitu:

1. Perencanaan yang komprehensif dalam menentukan rute / trayek angkutan perintis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan memperhatikan RPJMN, Renstra, serta kebutuhan masyarakat terhadap layanan angkutan perintis di lapangan;
2. Komitmen antara Pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam kegiatan peningkatan konektivitas transportasi darat terutama di daerah-daerah terisolir dan belum terlayani angkutan umum;
3. Dapat terus Mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dalam pelayanan jasa angkutan umum;
4. Meningkatkan kualitas layanan dari moda angkutan darat;
5. Dapat terus Mewujudkan pelayanan jasa angkutan yang handal;
6. Selalu Menciptakan rasa nyaman dan efisiensi terhadap pengguna jasa angkutan umum;
7. Dapat Mewujudkan konektivitas transportasi darat.

IKK 1.2 Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda

a.1 Definisi Indikator

Pelaksanaan layanan Angkutan Antarmoda bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dari dan menuju destinasi wisata pada Kawasan Strategi Pariwisata Nasional (KSPN) dan agar para wisatawan mendapatkan pelayanan transportasi yang terintegrasi, aman, selamat, nyaman, sehat, dan terjangkau.

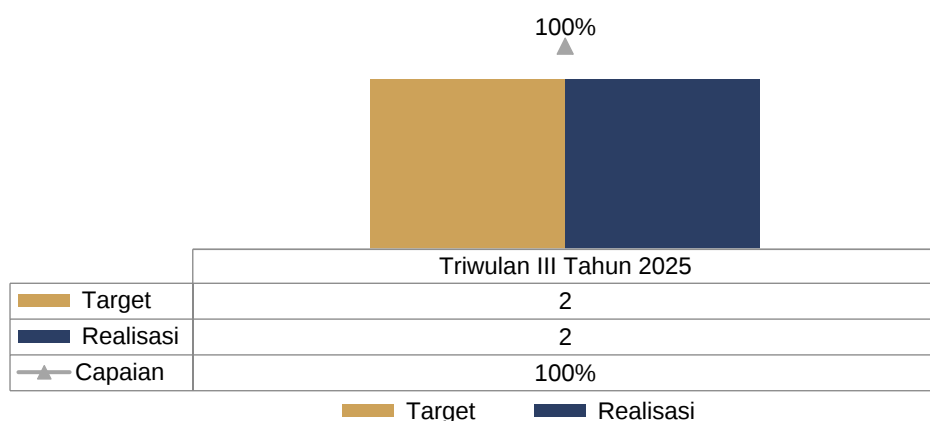
Capaian Kinerja Persentase pelaksanaan layanan Angkutan Antarmoda dihitung berdasarkan perbandingan realisasi fisik dan target yang telah ditetapkan.

Untuk menghitung Indikator Persentase pelaksanaan Layanan Angkutan Antarmoda digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Jumlah simpul transportasi nasional yang dilayani subsidi angkutan antarmoda} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bangka Belitung Tahun 2025

Realisasi Kinerja Jumlah simpul transportasi nasional yang dilayani subsidi angkutan antarmoda Triwulan I pada tahun 2025 sebesar 2 lokasi, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.2** Grafik Pencapaian IKK Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda.



Gambar II.2 Grafik Capaian IKK 1.2 Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda

a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

• Dasar Hukum

Sesuai Surat keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP – DRJD 6665 Tahun 2024 tanggal 26 November 2024 tentang Jaringan Trayek Angkutan Jalan Pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Tahun 2024, sebanyak 2 trayek ditetapkan untuk dilayani Angkutan Jalan pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.

- **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Simpul transportasi nasional yang terlayani subsidi angkutan antarmoda terhadap konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi memiliki target 2 pelabuhan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP – DRJD 6665 Tahun 2024.

- **Faktor Keberhasilan**

Adapun faktor keberhasilan tercapainya indikator jumlah simpul transportasi nasional yang terlayani subsidi angkutan antarmoda antara lain:

1. Koordinasi yang selalu terjalin pada *stakeholder* terkait;
2. Melaksanakan evaluasi kerja.

- **Faktor Kegagalan**

Adapun faktor kegagalan terhadap indikator jumlah simpul transportasi nasional yang terlayani subsidi angkutan antarmoda antara lain:

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap Angkutan Antarmoda pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN);
2. Kurangnya minat masyarakat untuk menggunakan Angkutan Antarmoda KSPN.

- **Realisasi Kinerja**

Realisasi Indikator Kinerja Jumlah Simpul Transportasi Nasional yang terlayani subsidi Angkutan Antarmoda Triwulan I tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

IKK 1.2 = Jumlah simpul transportasi nasional yang dilayani subsidi angkutan antarmoda

$$\% \text{ Capaian} = \frac{2}{2} \times 100\% = 100$$

- **Capaian Kinerja**

Capaian Kinerja Jumlah Simpul Transportasi Nasional yang terlayani subsidi Angkutan Antarmoda tahun 2025 sebesar 100%. Dimana hasil persentase capaian berasal dari realisasi dibagi target dikali 100 persen. Artinya nilai capaian berhasil mencapai target sempurna atau mampu memenuhi target.

- **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran terkait layanan angkutan antarmoda Tahun 2025 yaitu memiliki target keuangan senilai Rp. 1.909.346.000 dengan realisasi di Triwulan I Tahun 2025 Rp. 0,- atau mencapai 0%.

a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang yaitu:

1. Terlayannya angkutan antarmoda pada daerah Kawasan Strategi Pariwisata Nasional lainnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Menjamin keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan antarmoda;
3. Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai layanan Angkutan Antarmoda KSPN Tanjung Kalayang.

IKK 1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan

a.1 Definisi Indikator

Pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan merupakan kegiatan BPTD Kelas III Bangka Belitung yang saat ini bertugas untuk melakukan pengawasan operasional harian dan berkala terhadap kapal SDP agar penyelenggaraannya berjalan sesuai aturan dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.

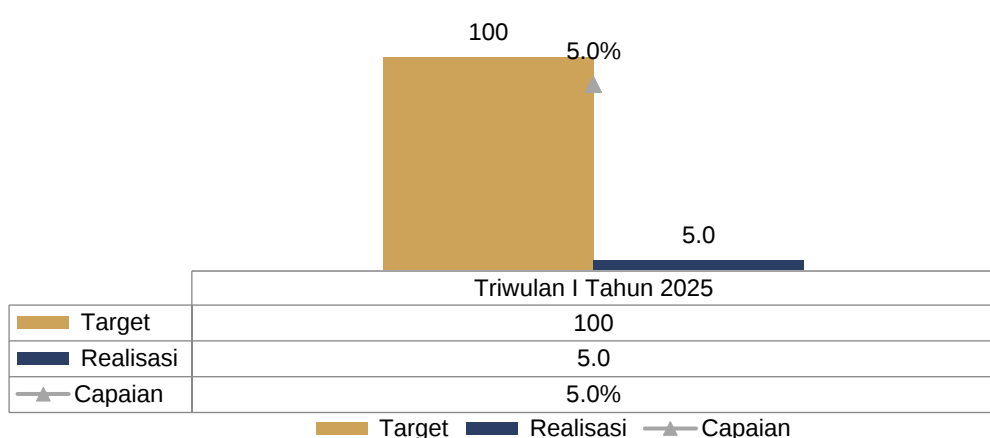
Persentase capaian kinerja pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah trip Penyeberangan yang terealisasi Dengan target yang telah ditetapkan.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan} = \frac{\text{Jumlah Trip realisasi}}{\text{Jumlah Trip Target}} \times 100\%$$

a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bangka Belitung Tahun 2025

Realisasi kinerja persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan Triwulan I tahun 2025 sebesar 5% jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 5%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.3** Grafik Pencapaian IKK Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan.



Gambar II.3 Grafik Pencapaian IKK Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan

a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

• Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, maka dengan ini ditetapkan dasar untuk pengawasan dan pelayanan terhadap operasional angkutan perintis Pelabuhan Penyeberangan.

• Kronologi Target Perjanjian Kerja

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan terhadap konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi memiliki target 100 yang diperoleh berdasarkan arahan pimpinan pada rapat renstra 2023-2024.

• Faktor Keberhasilan

Keberhasilan tercapainya indikator Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan antara lain:

1. Harga tiket yang kompetitif sehingga meringankan masyarakat; Jalur yang dilayani untuk masyarakat yang terisolir;
2. Kepastian jam operasional Keperintisan Angkutan Penyeberangan;
3. Satu-satunya pilihan moda transportasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan yang beroperasi melayani masyarakat Pulau Bangka dan Belitung.

- **Faktor Kegagalan**

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan antara lain:

1. Jadwal Operasional tidak Terlalu banyak;
2. Masyarakat masih belum mengetahui tentang Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan.

- **Realisasi Kinerja**

Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

$$\text{Persentase pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan} = \frac{\text{Jumlah Trip realisasi}}{\text{Jumlah Trip Target}} \times 100\%$$

- **Capaian Kinerja**

Capaian Kinerja Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan tahun 2025 adalah 5%. Dimana persentase capaian merupakan hasil realisasi dibagi target. Yang mana nilai pada realisasi adalah 5% dibagi nilai target adalah 100% dan dikali 100 persen. Artinya Capaian kinerja Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan tahun 2024 berhasil mencapai target dengan sempurna.

Tabel II.3 Capaian Realisasi Kinerja Kegiatan Keperintisan Angkutan Penyeberangan
Triwulan I Tahun 2025

No	Rincian lokasi	Volume	Satuan	Capaian Pengadaan Langsung (Januari)
1	Lintas Tanjung Ru – Tanjung Nyato	26	Trip	10
2	Lintas Tanjung Gading – Sadai	0	Trip	0
TOTAL		26	Trip	10

Sumber: Data Produksi PT. ASDP bulan Januari Tahun 2025

- **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran terkait Operasional pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan memiliki target keuangan senilai Rp. 5.887.587.000 dengan realisasi di Triwulan I Tahun 2025 Rp 0,- atau mencapai 0%.

a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Memenuhi persyaratan teknis laik laut dan SPM kapal penyeberangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Menghubungkan daerah yang belum memiliki moda transportasi lain secara memadai;
3. Menghubungkan daerah yang secara komersial belum menguntungkan untuk dilayani pelayaran niaga;
4. Melaksanakan standar pelayanan sesuai SOP yang telah dibuat.

IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP yang dibangun

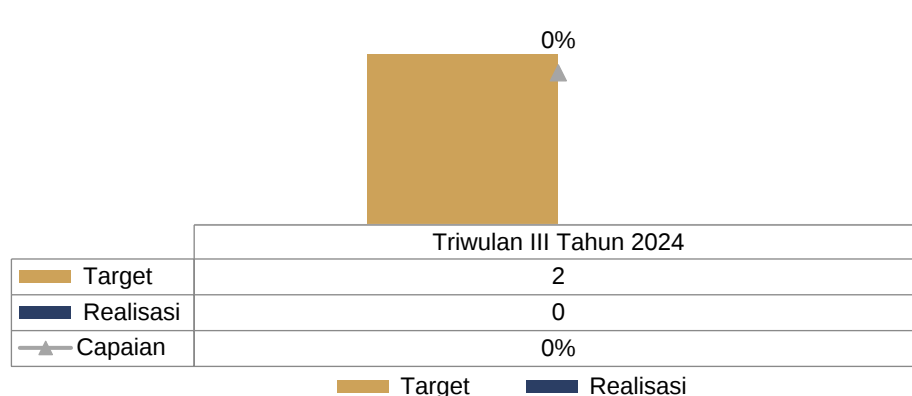
a.1 Definisi Indikator

BPTD Kelas III Bangka Belitung memiliki Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan SDP yang memiliki fungsi melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP terkait tugas dan tanggung jawab seluruh staf Pelabuhan Penyeberangan terhadap keselamatan transportasi angkutan umum di darat berjalan dengan benar serta mengevaluasi pelaksanaan terkait manajemen SDM. Capaian kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi dihitung berdasarkan perbandingan realisasi fisik dan target yang telah ditetapkan. Untuk menghitung Indikator Kinerja Program Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Pelabuhan SDP yang dibangun} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bangka Belitung Tahun 2025

Realisasi kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang dibangun Triwulan I tahun 2025 sebesar 2 lokasi jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 2 lokasi maka capaian kinerja mencapai 100%, dan progress realisasi jumlah pelabuhan SDP yang dibangun Triwulan I tahun 2025 sebesar 0% karena masih dalam proses lelang. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.4**. Grafik Capaian Jumlah Pelabuhan SDP yang dibangun.



Gambar II.4 Grafik Capaian Kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi

a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Berdasarkan PM 6 Tahun 2023 bahwa BPTD memiliki tugas untuk melakukan Pembangunan Pelabuhan Sungai, danau, dan penyeberangan serta di dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tahun 2020 – 2024 dan di lanjutkan dengan draft rensta tahun 2025-2029 terdapat pembangunan Pelabuhan penyeberangan baru di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Adapun Pelabuhan tersebut antara lain:

NO	Pelabuhan	Dasar Hukum
1.	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Bakit	PM 6 Tahun 2023 dan Renstra Hubdat 2020 – 2024
2.	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Mantung, Belinyu	PM 6 Tahun 2023 dan Renstra Hubdat 2020 – 2024

- **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Tahun 2024, Indikator Kinerja Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan terhadap konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi memiliki target 2 pelabuhan berdasarkan Renstra Perhubungan Darat tahun 2020 - 2024.

- **Faktor Keberhasilan**

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Persentase pelaksanaan Jumlah Pelabuhan SDP yang dibangun antara lain:

1. Petugas yang kompeten dibidangnya;
2. Koordinasi yang selalu terjalin dengan stakeholder terkait;
3. Selalu melaksanakan evaluasi kerja.

- **Faktor Kegagalan**

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Persentase pelaksanaan Jumlah Pelabuhan SDP yang dibangun antara lain:

1. Kurangnya SDM yang ada;
2. Keadaan Alam Seperti pasang air laut yang sering terjadi di sekitar wilayah Pembangunan pelabuhan;
3. Memakan waktu yang lama pada proses lelang.

- **Realisasi Kinerja**

Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP yang dibangun Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

$$\text{Jumlah Pelabuhan SDP yang dibangun dan beroperasi} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian} = \frac{0}{2} \times 100\% = 0\%$$

- **Capaian Kinerja**

Capaian Kinerja Jumlah pelabuhan SDP yang dibangun tahun 2025 sebesar 0%. Dimana hasil persentase capaian berasal dari realisasi dibagi target dikali 100 persen. Artinya nilai capaian di triwulan I masih belum optimal, kendala yang ada akan terus dibenahi sehingga kegiatan Pembangunan dapat terlaksana pada tahun 2025.

- **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran terkait Operasional Pelabuhan SDP yang beroperasi Tahun 2025 yaitu memiliki target keuangan senilai Rp. 85.915.120.000 dengan realisasi di Triwulan I Tahun 2025 Rp 0 atau mencapai 0%.

a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Mempersiapkan kebutuhan data dan keperluan yang sifatnya administrasi terlebih dahulu;
2. Peningkatan koordinasi dengan Direktorat terkait dan dalam hal ini Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
3. Menjamin kesesuaian spesifikasi teknis fisik.

II.2.2 Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat

Pencapaian Sasaran Kegiatan 2 diukur hanya melalui 2 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu IKK 2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dipelabuhan SDP dan IKK 2.6 Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi.

IKK 2.3 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dipelabuhan SDP

a.1 Definisi Indikator

BPTD Kelas III Bangka Belitung memiliki fungsi dan tugas terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP yang bertujuan untuk lebih meningkatkan aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan, dan keteraturan dalam penyelenggaraan angkutan penyeberangan.

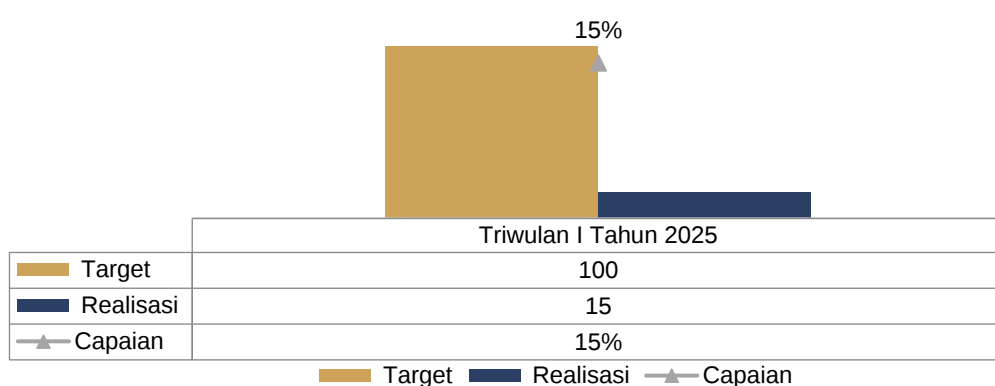
Capaian kinerja Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP dihitung berdasarkan perbandingan realisasi fisik dan target yang telah ditetapkan maka dari itu digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Pelaksanaan SPM dipelabuhan SDP} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bangka Belitung Tahun 2025

Realisasi kinerja Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP Triwulan I tahun 2025 sebesar 15 jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 100 maka capaian kinerja mencapai 15%. Pencapaian

ini digambarkan pada **Gambar II.5** Grafik Capaian IKK Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP Tahun 2025.



Gambar II.5 Grafik Capaian IKK Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di pelabuhan SDP

a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 62 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Penyeberangan, maka ditetapkan untuk pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan dibawah Lingkungan BPTD Kelas III Bangka Belitung.

- **Kronologi Target Perjanjian Kerja**

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP terhadap pelayanan transportasi darat memiliki target 100% yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan. Sepanjang Triwulan I tahun 2025 tidak terdapat perubahan target Perjanjian Kinerja (PK) 2025.

Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) pada angkutan penyeberangan di pelabuhan SDP merupakan persentase persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh perusahaan angkutan penyeberangan dalam memberikan pelayanan untuk meningkatkan aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan, dan keteraturan dalam penyelenggaraan angkutan penyeberangan. Adapun beberapa persyaratan minimal yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

Jenis Pemeriksaan	Uraian
1. SPM Pelayanan Penumpang 2. SPM Pemuatan Kendaraan 3. SPM Pengoperasian Kapal	Aspek Keselamatan
	Aspek Keamanan
	Aspek Kenyamanan
	Aspek Kemudahan / Keterjangkauan
	Aspek Kesenjangan
	Aspek Keteraturan

• Faktor Keberhasilan

Keberhasilan tercapainya indikator Kinerja Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP antara lain dipengaruhi oleh komitmen antara Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bangka Belitung dan pemerintah daerah dalam program pengembangan dan peningkatan pelayanan angkutan penyeberangan dengan adanya tindak lanjut sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan dan ketepatan jadwal keberangkatan di lapangan;
2. Melakukan pengawasan secara periodik terhadap ketepatan jadwal di lapangan;
3. Melakukan rapat evaluasi efektifitas pengaturan jadwal;
4. Memberlakukan sanksi yang tegas dan memberikan efek jera atas ketidakpatuhan perusahaan angkutan penyeberangan dalam mematuhi jam pelayanan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melalui Kegiatan :

1. Pemeriksaan Kapal Dalam Rangka Penerbitan Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan;
2. Pemeriksaan Kapal Angkutan Penyeberangan Setelah Docking Termasuk Kapal Perintis.

• **Faktor Kegagalan**

1. Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP mengalami kendala bilamana cuaca ekstrim seperti gelombang tinggi dan musim penghujan, sehingga dapat menghambat kegiatan tersebut.
2. Kurangnya pemahaman pengguna jasa tentang keselamatan dan ketertiban selama melakukan perjalanan dalam menggunakan angkutan penyeberangan.
3. Masih adanya kendaraan ODOL (*Over Dimensi Over Load*) yang menggunakan fasilitas angkutan penyeberangan, sehingga dapat membahayakan kendaraan dan pengguna jasa lain.

• **Realisasi Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar 15%. Adapun rumus yang digunakan dalam perhitungan Indikator Kinerja Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP yaitu:

$$\text{Jumlah Pelaksanaan SPM di pelabuhan SDP} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

• **Capaian Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{15}{100} \times 100\% = 15\%$$

• **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran terkait Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP tahun 2025 yaitu senilai Rp. 1.095.240.000 dengan realisasi di Triwulan I Tahun 2025 Rp 398.240.000 atau mencapai 36%.

a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Upaya untuk meningkatkan capaian Indikator Kinerja Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bangka Belitung akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Terpenuhinya persyaratan keselamatan yang menyangkut angkutan di sungai danau dan penyeberangan;
2. Peningkatan keamanan dan ketertiban pelabuhan SDP;
3. Menjamin kesesuaian spesifikasi teknis fisik kendaraan;
4. Melaksanakan Pelayanan di Pelabuhan SDP sesuai dengan SPM yang ada;
5. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan SPM di Pelabuhan SDP

IKK 2.6 Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi

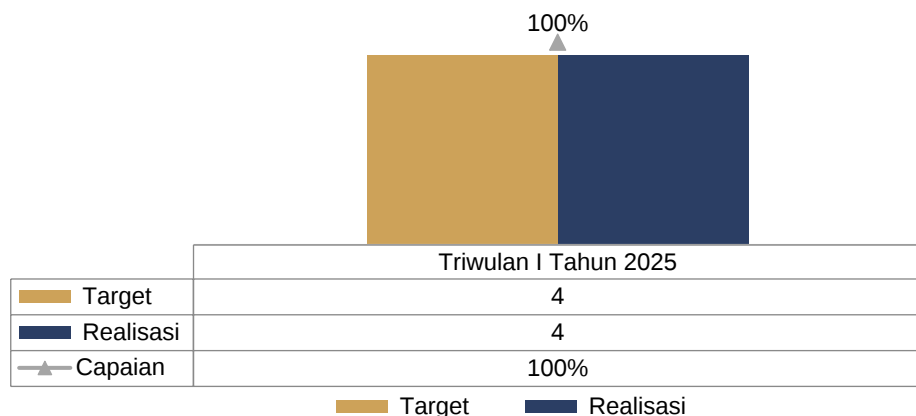
a.1 Definisi Indikator

BPTD Kelas III Bangka Belitung memiliki Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan SDP yang memiliki fungsi melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP terkait tugas dan tanggung jawab seluruh staf Pelabuhan Penyeberangan terhadap keselamatan transportasi angkutan umum di darat berjalan dengan benar serta mengevaluasi pelaksanaan terkait manajemen SDM. Capaian kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi dihitung berdasarkan perbandingan realisasi fisik dan target yang telah ditetapkan. Untuk menghitung Indikator Kinerja Program Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bangka Belitung Tahun 2025

Realisasi kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi Triwulan I tahun 2025 sebesar 4 lokasi jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 4 lokasi maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar II.6. Grafik Capaian Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi.



Gambar II.6 Grafik Capaian Kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi

b.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

- Dasar Hukum**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, BPTD Kelas III Bangka Belitung terdata 4 (empat) Satuan Pelayanan Pelabuhan SDP, Adapun Pelabuhan tersebut antara lain:

NO	Pelabuhan	Dasar Hukum
1.	Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Kalian	PM 6 Tahun 2023
2.	Pelabuhan Penyeberangan Sadai	PM 6 Tahun 2023
3.	Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Nyato	PM 6 Tahun 2023
4.	Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Ru	PM 6 Tahun 2023

- Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan terhadap konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi memiliki target 4 pelabuhan berdasarkan PM 6 Tahun 2023.

- **Faktor Keberhasilan**

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Persentase pelaksanaan Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi antara lain:

1. Petugas yang kompeten dibidangnya;
2. Kordinasi yang selalu terjalin dengan stakeholder terkait;
3. Selalu melaksanakan evaluasi kerja.

- **Faktor Kegagalan**

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Persentase pelaksanaan Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi antara lain:

1. Kurangnya SDM yang ada;
2. Keadaan Alam Seperti pasang air laut yang sering terjadi di sekitar kantor;
3. masih perlu peningkatan fasilitas kantor.

- **Realisasi Kinerja**

Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$\text{Jumlah Pelabuhan SDP yang dibangun dan beroperasi} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian} = \frac{4}{4} \times 100\% = 100$$

- **Capaian Kinerja**

Capaian Kinerja Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi tahun 2024 sebesar 100%. Dimana hasil persentase capaian berasal dari realisasi dibagi target dikali 100 persen. Artinya nilai capaian berhasil mencapai target sempurna atau mampu memenuhi target.

- **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran terkait Operasional Pelabuhan SDP yang beroperasi Tahun 2025 yaitu memiliki target keuangan senilai Rp. 1.095.240.000 dengan realisasi di Triwulan I Tahun 2025 Rp 398.240.000 atau mencapai 36%.

II.2.3 Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat

Pencapaian Sasaran Kegiatan 3 diukur hanya melalui 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu

1. IKK 4.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal.
2. IKK 4.5 Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan.
3. IKK 4.7a Presentase Standarisasi Pengujian Kendararaan Bermotor.

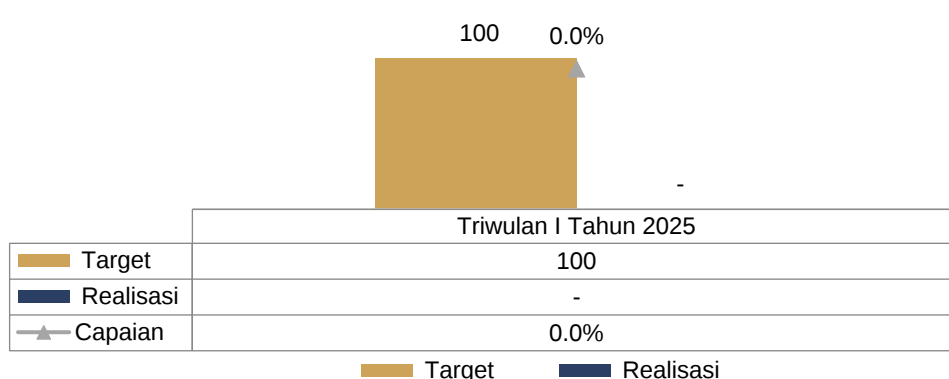
IKK 4.1 Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal

a.1 Definisi Indikator

BPTD Kelas III Bangka Belitung memiliki tugas dan fungsi untuk menginventaris kebutuhan infrastruktur keselamatan jalan, membangun dan memfasilitasi infrastruktur keselamatan jalan, serta melakukan monitoring terhadap fasilitas jalan yang telah terpasang sesuai kondisi ideal. Kebutuhan Perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Capaian kinerja Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal dihitung berdasarkan perbandingan realisasi fisik dan target yang telah ditetapkan.

a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bangka Belitung Tahun 2025

Realisasi kinerja Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal Triwulan I tahun 2025 sebesar 0 jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 0% maka capaian kinerja mencapai 0%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.7**. Grafik Capaian IKK Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal.



Gambar II.7 Grafik IKK Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal

a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.7234/AJ.401/DRJD/2013 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Perlengkapan Jalan, maka ditetapkan untuk pelaksanaan Perlengkapan Jalan BPTD Kelas III Bangka Belitung telah sesuai berdasarkan dasar hukum.

- **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal terhadap Keselamatan transportasi darat memiliki target 100 yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan. Sepanjang Triwulan I tahun 2025 tidak terdapat perubahan target Perjanjian Kinerja (PK) 2025.

- **Faktor Keberhasilan**

Adapun faktor keberhasilan tercapainya Indikator Perlengkapan Jalan yang telah terpasang dengan kondisi ideal, antara lain:

1. Kondisi lapangan yang mendukung, seperti cuaca;
2. Kontrak Pekerjaan tepat waktu;
3. Kesesuaian dengan kebutuhan.

- **Faktor Kegagalan**

Adapun faktor kegagalan terhadap indikator Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal antara lain:

1. Kondisi alam yang tidak memungkinkan (cuaca buruk)
2. Pekerjaan tidak selesai dengan waktu yang telah ditentukan
3. Adanya hari libur nasional yang lama sehingga menjadikan pekerjaan tertunda.

- **Realisasi Kinerja**

Realisasi Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal memiliki realisasi 100 persen. Untuk menghitung Indikator Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Perlengkapan Jalan yang telah terpasang ideal} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

• Capaian Kinerja

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal di Triwulan I Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

Tabel II.4 Capaian Realisasi Kinerja Kegiatan Persentase perlengkapan jalan telah terpasang dengan kondisi ideal Triwulan I Tahun 2025

No	Rincian Perlengkapan Jalan	Volume	Satuan	Capaian s.d Maret
1	Rambu Lalu Lintas (75 cm x 75 cm)	234	Unit	0
2	APJ lengan Tunggal	31	Unit	0
3	Marka Jalan Kuning	50	Meter	0
4	Warning Light	9	Unit	0
5	Guard Rail	650	Meter	0
6	Deliniator	3891	Unit	0
Total		4865	Unit	0

Sumber: Rincian Kertas Kerja BPTD Kelas III Bangka Belitung 2025

$$\% \text{ Capaian} = \frac{0}{4865} \times 100\% = 0\%$$

• Realisasi Anggaran

Adapun anggaran terkait Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal Tahun 2025 yaitu memiliki target keuangan senilai Rp. 10.545.540.000,- dengan realisasi di Triwulan I Tahun 2025 Rp. 0 atau mencapai 0%.

a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Mewujudkan ketertiban dalam pelaksanaan pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan;

2. Mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan serta memberikan kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas;
3. Mewujudkan jalan yang berkeselamatan.

IKK 4.5 Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan

a.1 Definisi Indikator

BPTD Kelas III Bangka Belitung memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan himbauan Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan kepada para masyarakat melalui kegiatan pekan nasional keselamatan jalan.

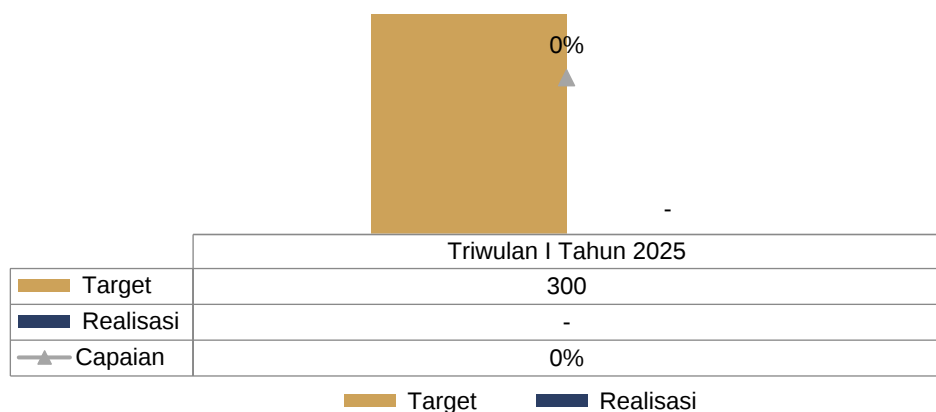
Capaian kinerja Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan dihitung berdasarkan perbandingan realisasi fisik dan target yang telah ditetapkan.

Untuk menghitung Indikator Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan digunakan rumus sebagai berikut:

IKK 4.5 = Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan

a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bangka Belitung Tahun 2025

Realisasi kinerja Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan Triwulan I tahun 2025 sebesar 0% jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 300 maka capaian kinerja mencapai 0%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.8**. Grafik Capaian IKK Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan.



Gambar II.8 Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan

a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Sesuai dengan Pasal 208 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, tentang Budaya Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan Ayat 2 Butir b “Sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Dan Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 3 tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan.

- **Kronologi Target Perjanjian Kerja**

Tahun 2025, Indikator Kinerja Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan Kecepatan terhadap Keselamatan transportasi darat memiliki target 300 yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

- **Faktor Keberhasilan**

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan antara lain:

1. Sosialisai tentang acara Pekan Nasional Keselamatan Jalan pada media sosial dan spanduk;
2. Tersedianya anggaran yang memadai;
3. Kerjasama Tim panitia pelaksanaan Pekan Nasional Keselamatan Jalan.

- **Faktor Kegagalan**

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan antara lain:

1. Tidak tersampainya informasi keselamatan bagi masyarakat yang tidak memperhatikan sosialisasi;
2. Tidak tersampainya undangan untuk menghadiri acara;
3. Panitia penyelenggara kurang berpengalaman.

- **Realisasi Kinerja**

Persentase capaian Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan tahun anggaran 2025 belum terealisasi karena pada hal nya sosialisasi pekan keselamatan jalan akan direncanakan akan dilaksanakan pada minggu pertama dibulan Agustus.

- **Capaian Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{0}{300} \times 100\% = 0\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran terkait Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan Tahun 2025 yaitu memiliki target keuangan senilai Rp. 200.000.000,- dengan realisasi di Triwulan I Tahun 2025 Rp. 0,- atau mencapai 0%.

a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Mewujudkan pelayanan yang berkeselamatan;
2. Menciptakan rasa nyaman bagi penumpang yang ingin menggunakan angkutan umum;
3. Mewujudkan bentuk tanggungjawab dan kepedulian insan perhubungan.

IKK 4.7a Presentase Standarisasi Pengujian Kendaraan Bermotor

a.1 Definisi Indikator

Capaian Kinerja Presentase Standarisasi Pengujian Kendaraan Bermotor dihitung berdasarkan perbandingan jumlah pemda di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah UPUPKB terakreditasi dengan Jumlah total Pemda di Prov Bangka Belitung di wilayah kerja BPTD, maka dari itu digunakan rumus sebagai berikut:

a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bangka Belitung Tahun 2025

Realisasi kinerja Presentase Standarisasi Pengujian Kendaraan Bermotor Triwulan I tahun 2025 senilai 0%. Jika dibandingkan dengan target PK 2025 presentase 90% maka capaian kinerja mencapai 0% Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.9**. Grafik Capaian IKK Capaian kinerja Presentase Standarisasi Pengujian Kendaraan Bermotor.

a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, maka telah ditetapkan sebagai dasar Penyelenggaraan Standarisasi Pengujian Kendaraan.

- **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Tahun 2025, Indikator Kinerja Standarisasi PKB terhadap presentase standarisasi Pengujian Kendaraan Bermotor memiliki target 90% yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

- **Faktor Keberhasilan**

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator standarisasi pengujian kendaraan bermotor antara lain:

1. Kegiatan terlaksana dengan waktu yang sudah ditentukan;
2. Terkoordinasikannya kegiatan kalibrasi alat uji dengan Dinas Perhubungan Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. SDM yang bersolidaritas.

- **Faktor Kegagalan**

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat antara lain:

1. Adanya pengurangan anggaran;
2. kurangnya SDM yang ada.

- **Realisasi Kinerja**

Realisasi kinerja standarisasi pengujian kendaraan bermotor dihitung berdasarkan perbandingan realisasi fisik dan target yang telah ditetapkan, maka dari itu digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Presentase Standarisasi Pengujian Kendaraan Bermotor} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- **Capaian Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Presentase Standarisasi Pengujian Kendaraan Bermotor di Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{0}{90} \times 100\% = 0\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran kegiatan terkait Capaian Indikator Kinerja Persentase Standarisasi Pengujian Kendaraan Bermotor di Tahun 2025 yaitu senilai Rp 1.600.000.000,- dan sampai dengan Triwulan I 2025 realisasi anggaran senilai Rp 0,- atau sebesar 0%.

II.2.4 Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

Pencapaian Sasaran Kegiatan 5 diukur hanya melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu IKK 5.1 Kualitas Penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat.

IKK 5.1 Kualitas Penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat

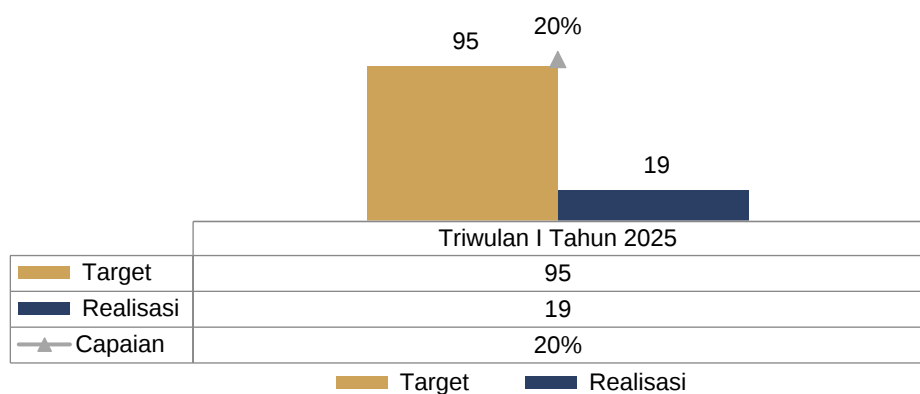
a.1 Definisi Indikator

Capaian kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat dihitung berdasarkan perbandingan realisasi fisik dan target yang telah ditetapkan, maka dari itu digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kualitas Penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bangka Belitung Tahun 2025

Realisasi kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Triwulan I tahun 2025 senilai 19%. Jika dibandingkan dengan target PK 2025 senilai 95 maka capaian kinerja mencapai 20% Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.9**. Grafik Capaian IKK Capaian kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat.



Gambar II.9 Grafik Capaian IKK Capaian kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat.

a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, maka telah ditetapkan sebagai dasar Penyelenggaraan Kinerja Kualitas dukungan teknis transportasi darat.

- **Kronologi Target Perjanjian Kerja**

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terhadap Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis transportasi darat memiliki target senilai 95 yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

Penyelenggaraan Kinerja Kualitas dukungan teknis transportasi darat pada tahun 2025 telah dilakukan untuk kegiatan penunjang teknis. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu:

1. Penyusunan bahan RKA
2. Penyusunan SAKIP, LKIP dan Profil BPTD
3. Peningkatan Motivasi Bagi Pegawai
4. Pengiriman Pegawai Diklat
5. Rapat Teknis, Koordinasi dan Konsolidasi
6. Monwas Hubdat
7. Monwas sarpras
8. Kalibrasi alat uji
9. Sosialisasi Andalalin di Provinsi Kalimantan Selatan;
10. Pengawasan Gakum;
11. Monev Angkutan Komersil dan Perintis
12. Monitoring Pelayanan TSDP
13. Ramphcheck Kapal Penyeberangan
14. Monitoring dan Pengawasan Pemenuhan SPM Kapal
15. Monev Sarpras Ditjen Hubdat

- **Faktor Keberhasilan**

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat antara lain:

1. Kegiatan terlaksana dengan waktu yang sudah ditentukan;
2. Terkoordinasikannya kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan dengan stakeholder terkait;
3. SDM yang bersolidaritas.

- **Faktor Kegagalan**

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat antara lain:

1. Adanya pengurangan anggaran;
2. kurangnya SDM yang ada.

- **Realisasi Kinerja**

Realisasi kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat dihitung berdasarkan perbandingan realisasi fisik dan target yang telah ditetapkan, maka dari itu digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kualitas Penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- **Capaian Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat di Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{19}{95} \times 100\% = 20\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran kegiatan terkait Capaian Indikator Kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat di Tahun 2025 yaitu senilai Rp 4.348.153.000,- dan sampai dengan Triwulan I 2025 realisasi anggaran senilai Rp 125.200.821,- atau sebesar 3%.

a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya untuk meningkatkan capaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknistransportasi darat dimasa yang akan datang yaitu:

1. Meningkatkan Sistem Informasi Kepegawaian;
2. Melaksanakan pengelolaan naskah yang masuk dan keluar serta mengkoreksi naskahdinas agar sesuai aturan;
3. Meningkatkan pengelolaan arsip baik inaktif maupun statis sesuai pola kearsipan;
4. Dapat menyelesaikan capaian laporan bulanan, triwulanan dan tahunan berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilakukan sebagai pertanggungjawaban tugas kepada atasan.

II.2.5 Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel

Pencapaian Sasaran Kegiatan 6 diukur hanya melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat.

IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

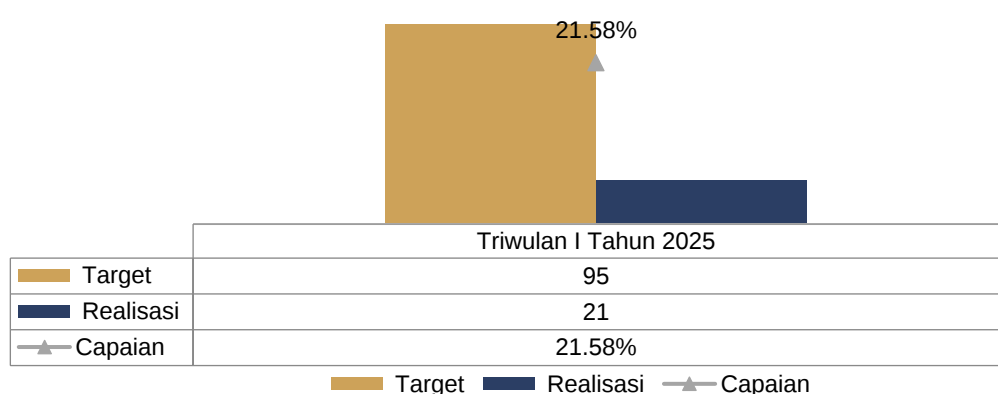
a.1 Definisi Indikator

Capaian kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat dihitung berdasarkan perbandingan realisasi fisik dan target yang telah ditetapkan, maka dari itu digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bangka Belitung Tahun 2025

Realisasi kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Triwulan I tahun 2025 sebesar 20.5. Jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 95 maka capaian kinerja mencapai 21.5%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.10**. Grafik Capaian IKK Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat.



Gambar II.10 Grafik Capaian IKK Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, maka telah ditetapkan sebagai dasar Penyelenggaraan Perkantoran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bangka Belitung pada tahun 2025.

- **Kronologi Target Perjanjian Kerja**

Tahun 2025, Indikator Kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat terhadap Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel memiliki target 95 yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bangka Belitung pada tahun 2023 telah dilakukan secara maksimal untuk tercapainya Manajemen pelayanan perkantoran terhadap seluruh Sumber Daya Manusia.(SDM) pegawai di Lingkungan BPTD Kelas III Bangka Belitung.

Adapun beberapa pelayanan perkantoran yang telah diserap, yaitu:

1. Operasional dan Pemeliharaan Kantor
2. Honorarium Satuan Kerja
3. Honorarium ULP/Pejabat Pengadaan/PPHP
4. Gaji dan Tunjangan Pegawai.

- **Faktor Keberhasilan**

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat antara lain:

1. Adanya SDM yang berkompeten
2. Kegiatan yang ada di Kantor sudah terjadwal secara rutin
3. Evaluasi setiap bulan

- **Faktor Kegagalan**

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat antara lain:

1. Kurangnya SDM yang ada
2. Pengurangan Anggaran

- **Realisasi Kinerja**

Realisasi kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat dihitung berdasarkan perbandingan realisasi fisik dan target yang telah ditetapkan, maka dari itu digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- **Capaian Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat di Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{20.5}{95} \times 100\% = 21.5\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran terkait Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 yaitu memiliki target keuangan senilai Rp. 14.336.952.000,- dengan realisasi di Triwulan I Tahun 2025 Rp 2.921.764.619,- atau mencapai 19%.

a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Pimpinan dapat melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing;
2. Dapat Memberikan kesimpulan dalam bentuk umpan balik sehingga dapat terus mengarahkan pencapaian visi dan misi sasaran yang telah ditetapkan;
3. Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi yang mampu menjamin arah pembangunan secara berkesinambungan

II.3 Realisasi Anggaran

II.3.1 Alokasi Anggaran Tahun 2025

- Pagu Anggaran

Pagu awal DIPA T.A. 2025 sebesar Rp. 135.712.611.000,- terbilang **(Seratus Tiga Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.5 Tabel Rincian per Sumber Dana Pagu Awal Tahun 2025

RM	Rp.	47.800.890.000	35%
PNBP	Rp.	1.996.601.000	2%
SBSN	Rp.	85.915.120.000	63%
Total	Rp.	135.712.611.000	100%

Tabel II.6 Tabel Rincian per Jenis Belanja Pagu Awal Tahun 2024

Belanja Pegawai	Rp.	7.857.288.000	6%
Belanja Barang	Rp.	30.055.225.000	22%
Belanja Modal	Rp.	97.800.098.000	72%
Total	Rp.	135.712.611.000	100%

Meskipun Pagu BPTD Kelas III Bangka Belitung terdapat 3 (tiga) kali revisi dengan rincian 2 (dua) kali revisi DIPA dan 1 (satu) kali revisi POK/ satker sehingga mengalami perubahan dan pergeseran pagu pada DIPA Ditjen Hubdat TA. 2025 namun sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 tetap sebesar **Rp. 135.712.611.000,.** Penambahan/pergeseran anggaran tersebut sesuai Surat Pengesahan Revisi Anggaran sebagai berikut:

- Surat Kementerian Keuangan tanggal 02 Desember 2024 Nomor : SP DIPA- 022.03.2.690667/2025 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bangka Belitung TA. 2025 (DIPA awal);
- Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat tanggal 18 Februari 2025 Nomor : KU.001/1/19/DJPD/2025 perihal Surat Efisiensi Anggaran TA.2025 di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat (Revisi 1 Efisiensi Anggaran).

- Revisi Anggaran Tahun 2025

Berdasarkan dengan adanya revisi DIPA Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bangka Belitung yang dilakukan penyesuaian anggaran sebanyak 3 (tiga) kali revisi dengan rincian 2 (dua) kali revisi DIPA dan 1 (satu) kali revisi POK/ satker , maka berikut adalah rincian revisi per sumber dana dan per jenis belanja.

Tabel II.7 Rincian Revisi Per Sumber Dana T.A.2025

	SUMBER DANA			JUMLAH
	RM	PNBP	SBSN	
PAGU AWAL	47.800.890.000	1.996.601.000	85.915.120.000	135.712.611.000
REVISI KE-1 (Revisi Blokir Efisiensi)	47.800.890.000	1.996.601.000	85.915.120.000	135.712.611.000
REVISI KE-2 (Revisi Pembukaan Blokir)	47.800.890.000	1.996.601.000	85.915.120.000	135.712.611.000

Sumber: Data diolah dari Bagian Keuangan, BPTD Kelas III Bangka Belitung

Tabel II.8 Rincian Revisi Per Jenis Belanja T.A.2025

	JENIS BELANJA			JUMLAH
	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	
PAGU AWAL	7.857.288.000	30.055.225.000	97.800.098.000	135.712.611.000
REVISI KE-1	7.857.288.000	30.055.225.000	97.800.098.000	135.712.611.000
REVISI KE -2	7.857.288.000	30.055.225.000	97.800.098.000	135.712.611.000

Sumber: Data diolah dari Bagian Keuangan, BPTD Kelas III Bangka Belitung



Tabel II.9 Rincian Relokasi Per Sumber Dana dan Perjenis Belanja T.A.2025

	PAGU AWAL	PERUBAHAN	PAGU AKHIR PER TRIWULAN I	PERUBAHAN	PAGU AKHIR PER TRIWULAN II	PERUBAHAN	PAGU AKHIR PER TRIWULAN III
Belanja Pegawai	7.857.288.000	-	7.857.288.000	-			
Belanja Barang	30.055.225.000	-	30.055.225.000				
· RM	47.800.890.000		47.800.890.000				
· PNPB	1.996.601.000	-	1.996.601.000	-			
Belanja Modal	97.800.098.000		97.800.098.000	-			
· RM	47.800.890.000		47.800.890.000	-			
· PNPB	1.996.601.000	-	1.996.601.000	-			
· SBSN	85.915.120.000	-	85.915.120.000	-			
TOTAL	135.712.611.000		135.712.611.000	-			

Sumber: Data diolah dari Bagian Keuangan, BPTD Kelas III Bangka Belitung

Daftar isian Pagu yang dijabarkan diatas, dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan program yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut (anggaran sesuai dengan yang telah direvisi):

Pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan program yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut (anggaran sesuai dengan yang telah direvisi):



Tabel II.10 Rincian Program-program Kegiatan DIPA T.A.205

KODE	URAIAN PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU PER TRIWULAN I	TRIWULAN I		PAGU PER TRIWULAN II	TRIWULAN II		PAGU PER TRIWULAN III	TRIWULAN III		PAGU PER TRIWULAN IV	TRIWULAN IV	
				REALIASI	%		REALIASI	%		REALIASI	%		REALIASI	%
022.03	BPTD Kelas III Bangka Belitung	135.712.611.000	135.712.611.000	3.445.205.440	2.54									
GA	Program Infrastruktur Konektivitas													
4637	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	99.958.246.000	99.958.246.000	0	0									
4638	Pelayanan Transportasi Darat	1.095.240.000	1.095.240.000	398.240.000	36.36									
4639	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	15.974.020.000	15.974.020.000	0	0									
4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	4.348.153.000	4.348.153.000	125.200.821	2.88									
WA	Program Dukungan Manajemen													
4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	6.479.664.000	6.479.664.000	605.099.792	9.34									
4671	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	7.857.288.000	7.857.288.000	2.316.664.827	29.48									

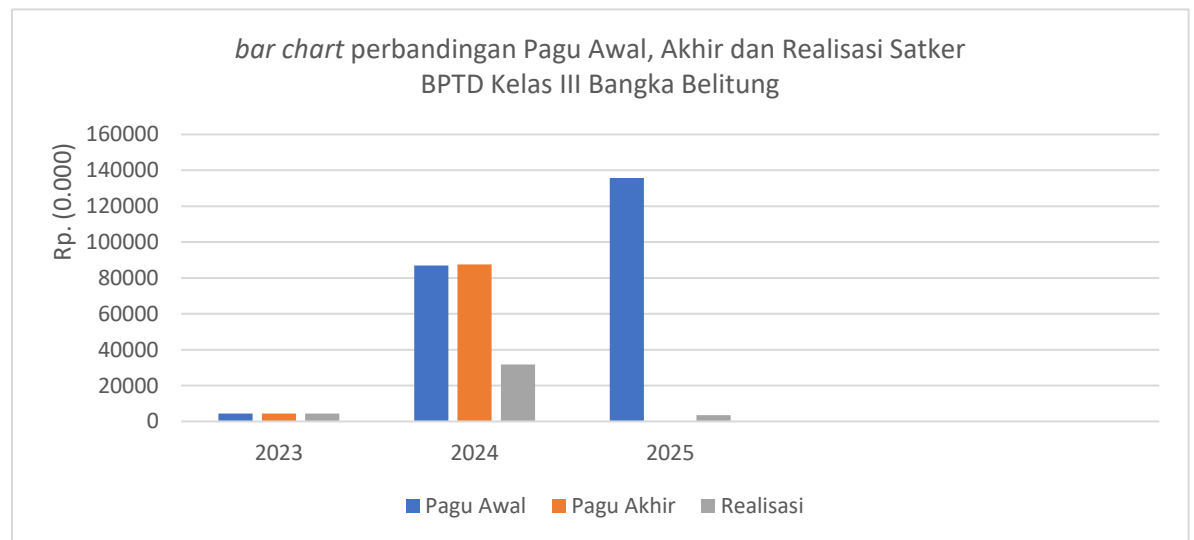
Sumber: Data diolah dari Bagian Keuangan, BPTD Kelas III Bangka Belitung

- Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023-2025
Adapun data perbandingan pagu dan realisasi dari tahun 2023 - 2025, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.11 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023-2025

No	Tahun	Pagu Awal	Pagu Akhir	Realisasi	
		Rp.	Rp.	Rp.	%
1.	2023	4.426.079.000	4.426.079.000	4.424.448.136	99,96%
2.	2024	86.933.688.000	87.479.266.000	31.794.880.230	36,35%
3.	2025	135.712.611.000		3.445.205.000	2.54%

Sumber: Data diolah dari Bagian Keuangan, BPTD Kelas III Bangka Belitung



Gambar II.11 Grafik Perbandingan Pagu Akhir dan Realisasi Anggaran Tahun 2023-2025

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwasannya nilai pagu awal dan pagu akhir setiap tahunnya tidak mengalami perubahan besaran pagu, dan diketahui masing – masing anggaran yang terserap setiap tahunnya dengan hasil prognosa akhir mendekati 100%. Seperti pada tahun 2023 anggaran yang terserap sebesar Rp. 4.424.448.136,- atau mencapai 99,96% dari pagu akhir sebesar Rp. 4.426.079.000,-, sedangkan selanjutnya pada Tahun Anggaran berjalan 2024 dapat diketahui total penyerapan pada Triwulan IV terhitung 94.8% yaitu sejumlah Rp. 82.077.374.266,- dari total Pagu Anggaran sebesar Rp. 86.570.191.000,-

II.3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2024

- Realisasi Anggaran Per sasaran program dan Kegiatan Tahun 2024
Pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan program yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut (anggaran sesuai dengan yang telah direvisi):

Tabel II.12 Kegiatan Program yang ada dalam DIPA 2024

KODE	NOMEN KLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU PER TRIWULAN III	TRIWULAN III		PAGU PER TRIWULAN IV	TRIWULAN IV	
				REALISASI	%		REALISASI	%
022.03	Ditjen Perhubungan Darat	86.933.688.000	86.570.191.000	19.412.865.017	22.42	86.570.191.000	82.077.374.266	94.81
022.03.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	80.515.660.000	80.152.163.000	16.676.835.103	20.8	80.152.163.000	75.659.445.954	94.3
4637	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	57.682.765.000	57.649.268.000	3.462.088.977	6	57.649.268.000	55.263.885.992	95.86
4638	Pelayanan Transportasi Darat	1.055.240.000	1.055.240.000	751.256.503	71.1	1.055.240.000	1.055.231.428	100
4639	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	17.077.502.000	16.747.502.000	10.990.273.896	65.62	16.747.502.000	14.647.085.720	87.46
4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	4.700.153.000	4.700.153.000	1.473.215.727	31.34	4.700.153.000	4.693.242.814	99.85
022.03.WA	Program Dukungan Manajemen	6.418.028.000	6.418.028.000	2.736.029.914	42.63	6.418.028.000	6.417.928.312	100
4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	6.418.028.000	6.418.028.000	2.736.029.914	42.63	6.418.028.000	6.417.928.312	100

Sumber: Data diolah dari Bagian Keuangan, BPTD Kelas III Bangka Belitung



• Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2025

Adapun data realisasi anggaran per jenis belanja pada tahun 2025 yang sudah di analisis per Triwulan I, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.13 Realisasi Anggaran Perjenis Belanja Triwulan I Tahun 2025

NO	Kode Nama Kegiatan	Belanja Pegawai	Belanja Barang				Belanja Modal				Total			
			Pagu	Realisasi	%	Sisa	Pagu	Realisasi	%	Sisa	Pagu	Realisasi	%	Sisa
1	4637 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	-	14.043.126.000	0	0	14.043.126.000	85.915.120.000	0	0	85.915.120.000	99.958.246.000	0	0	99.958.246.000
2	4638 Pelayanan Transportasi Darat	-	1.045.240.000	392.240.000	38.1	653.000.000	50.000.000	0	0	50.000.000	1,095,240,000	392.240.000	36.36	703.000.000
3	4639 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	-	4.789.020.000	0	0	4.789.020.000	11.185.000.000	0	0	609,936,242	15.974.020.000	0	0	15.974.020.000
4	4640 Penunjang Teknis Transportasi Darat	-	4.348.153.000	125.200.821	2.86	4.222.952.179	0	0	0	0	4.348.153.000	125.200.821	2.88	4.222.952.179
5	4670 Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	-	5.829.686.000	601.199.792	10.31	5.228.486.208	649.078.000	3.900.000	0.6	645.178.000	6.479.664.000	605.099.792	9.34	5.874.564.208
6	4671 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	7.857.288.000	7.857.288.000	2.316.664.827	29.48	5.540.623.173	0	0	0	0	7.857.288.000	2.316.664.827	29.48	5.540.623.173

Sumber: Data diolah dari Bagian Keuangan, BPTD Kelas III Bangka Belitung

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui realisasi anggaran per jenis belanja Tahun 2025 Triwulan I sebesar 2.54%

- Analisis Dana Yang Tidak Terserap oleh Unit Kerja

Berikut merupakan data dari dana yang tidak terserap oleh unit kerja berdasarkan per jenis belanja, per sumber dana, dan sisa anggaran pada tahun 2025, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.15 Analisa Sisa Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2025

NO	JENIS RUPIAH	PAGU AKHIR	REALISASI	SISA PAGU
		Rp.	Rp.	Rp.
1	Belanja Pegawai	7.857.288.000	2.316.664.827	5.540.623.173
2	Belanja Barang	30.055.225.000	1.124.640.613	28.930.584.387
3	Belanja Modal	97.800.098.000	3.900.000	97.800.098.000
TOTAL		135.712.611.000	3.445.205.440	132.267.405.560

Sumber: Data diolah dari Bagian Keuangan, BPTD Kelas III Bangka Belitung

Tabel II.16 Analisa Sisa Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2025

NO	JENIS RUPIAH	PAGU AKHIR	REALISASI	SISA PAGU
		Rp.	Rp.	Rp.
1	Rupiah Murni	47.800.890.000	3.445.205.440	44.355.684.560
2	PNBP	1.996.601.000	0	1.996.601.000
3	SBSN	85.915.120.000	0	85.915.120.000
TOTAL		135.712.611.000	3.445.205.440	132.267.405.560

Sumber: Data diolah dari Bagian Keuangan, BPTD Kelas III Bangka Belitung

Tabel II.14 Rincian Proyeksi Sisa Anggaran Tahun 2025

NO	Uraian Sisa Anggaran	PAGU AKHIR	REALISASI
		Rp.	Rp.
1	Kegiatan yang tidak Terlaksana	-	-
2	Kegiatan yang Terblokir	57.965.154.000	-
3	Belanja Kontraktual	115.932.266.000	-
	a. Belanja Barang	25.171.846.000	-
	b. Belanja Modal	90.760.420.000	-
4	Belanja Non Kontraktual	11.923.057.000	1.128.540.613
	a. Belanja Barang	11.223.079.000	1.124.640.613
	b. Belanja Modal	699.978.000	3.900.000
5	Sisa Belanja Pegawai	7.857.288.000	2.316.664.827

Sumber: Data diolah dari Bagian Keuangan, BPTD Kelas III Bangka Belitung



II.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut merupakan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan sasaran program per Triwulan I Tahun 2025, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.15. Efisiensi Anggaran

No	Sasaran Progam		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
			% Capaian Rata2 Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Persentase Efisiensi anggaran (triwulan I)	% Capaian Rata2 Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Persentase Efisiensi anggaran (TriwulanII)	% Capaian Rata2 Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Persentase Efisiensi anggaran (Triwulan III)			
1	SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan antarmoda Transportasi	28.75	0	0									
2	SK2	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	57	36	1.5									
3	SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	0	0	0									
4	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi darat	20	3	1									

No	Sasaran Progam		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
			% Capaian Rata2 Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Persentase Efisiensi anggaran (triwulan I)	% Capaian Rata2 Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Persentase Efisiensi anggaran (Triwulan II)	% Capaian Rata2 KinerjaSasaran	% Capaian Keuanga n	Persentase Efisiensi anggaran (Triwulan III)			
5	SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	21.5	19	1.2									
		Rata-Rata	25.45%	11.6%	0.74%									

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui bahwa dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran Triwulan I ialah sebesar 25.45% dengan realisasi anggaran (capaian keuangan) sebesar 11.6% menunjukkan adanya efisiensi anggaran sebesar 0.74%.



II.5 Hambatan dan Kendala

Beberapa Hambatan/Kendala masih rendahnya realisasi daya serap anggaran antara lain:

1. Masih kurangnya pemenuhan dalam Sumber Daya Manusia yang mana tugas dan fungsinya di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bangka Belitung;
2. Sistem perencanaan yang masih kurang matang mengenai pemahaman kebutuhan anggaran;
3. Masih Kurangnya Koordinasi dari masing-masing PIC disetiap kegiatan, sehingga perlu diadakan sosialisasi terkait pelaporan capaian kinerja;
4. Dalam Kegiatan kontrak, faktor cuaca/ faktor alam tidak menentu yang menjadikan kendala dalam pelaksanaannya.



BAB III

PENUTUP

BAB III

PENUTUP

III.1 Ringkasan Capaian

Dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bangka Belitung serta Pengelolaan Sumber Daya dan Pelaksanaan Kebijakan dan Kegiatan. Laporan Monitoring Capaian Kinerja (LMCK) Triwulan I ini perlu disusun secara berkala sebagai salah satu alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Dari 11 (sepuluh) Indikator Kinerja Program (IKP) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bangka Belitung Triwulan I tahun 2025, terdapat 2 (tiga) Indikator Kinerja Program yang lebih besar atau sama dengan 100% ($IKP \geq 100\%$) dan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Program kurang dari 100% ($0\% \leq IKP < 100\%$). Adapun rincian capaian untuk setiap IKP pada Triwulan I tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Presentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan terealisasi sebesar 10% (target 100%);
2. Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda terealisasi sebesar 100% (target 2 lokasi);
3. Presentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan terealisasi sebesar 5 % (target 100%);
4. Jumlah Pelabuhan yang dibangun terealisasi sebesar 0% (target 2 lokasi);
5. Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP terealisasi sebesar 15 % (target 100%);
6. Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi, Pelabuhan yang beroperasi terealisasi sebesar 100% (target 4 Lokasi)
7. Presentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Dengan Kondisi Ideal terealisasi sebesar 0% (target 100%);
8. Jumlah Masyarakat yang Tersosialisasi tentang Keselamatan Transportasi Jalan terealisasi sebesar 0% (target 300 orang);
9. Presentase Standarisasi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar 0% (target 90%)

10. Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat terealisasi sebesar 20% (target nilai 95);
11. Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat terealisasi sebesar 29% (target nilai 95).

Untuk meningkatkan capaian kinerja di triwulan selanjutnya, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bangka Belitung akan melakukan proses yang lebih selektif terhadap pengusulan target renstra dengan menerapkan skala prioritas untuk peningkatan pembangunan sarana dan prasarana dengan pertimbangan ketersediaan anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bangka Belitung.

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bangka Belitung juga akan meningkatkan koordinasi dengan melakukan monitoring keselamatan dan keamanan transportasi darat dan penyeberangan agar dapat lebih meningkatkan kinerja menuju *zero accident*.



III.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi, dan Unit Kerja Penanggung Jawab

Tabel III.1 Hasil Evauasi, Rekomendasi, dan Unit Kerja Penanggung Jawab

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	TARGET DALAM PK	TRIWULAN I			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
							TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan antarmoa tranportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	100	10	10%	Pengawasan Pelaksanaan kegiatan Bulan Maret	Persiapan pelaksanaan pelayanan dan pengawasan Bulan April serta Persiapan pembayaran bulan maret	Kepala Balai
			IKK 1.2	Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda	lokasi	2	2	2	100%	Pengawasan Pelaksanaan kegiatan Bulan Maret	Persiapan pelaksanaan pelayanan dan pengawasan Bulan April serta Persiapan pembayaran bulan maret	Kepala Balai
			IKK 1.5	Presentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan	%	100	100	5	5%	Presentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan	Persiapan pelaksanaan kontrak dan pelayanan Maret - Desember	Kepala Balai
			IKK 1.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang dibangun	Lokasi	2	2	0	0	Belum Tercapai	Persiapan pelaksanaan Kontrak	Kepala Balai

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	TARGET DALAM PK	TRIWULAN III			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
							TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
2	SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	100	15	15%	Pelaksanaan SPM di Bulan Maret dan Anggaran Kegiatan terkena Blokir Automatic Adjustement sehingga nominal Anggaran kegiatan menjadi Rp. 619.240.000	Pelaksanaan SPM di Bulan April - Desember	Kepala Balai
			IKK 2.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4	4	4	100	Pelaksanaan Pengawasan Operasional Pelabuhan SDP Bulan Maret dan Anggaran Kegiatan terkena Blokir Automatic Adjustement sehingga nominal Anggaran kegiatan menjadi Rp. 619.240.000	Persiapan Pelaksanaan Pengawasan Operasional Pelabuhan SDP Bulan April	Kepala Balai
3	SK 4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi darat	IKK 4.1	Presentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	100	0	0%	Anggaran Kegiatan terkena Blokir Automatic Adjustement	Anggaran Kegiatan terkena Blokir Automatic Adjustement	Kepala Balai
			IKK 4.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	300	0	0	0%	Anggaran Kegiatan terkena Blokir Automatic Adjustement	Anggaran Kegiatan terkena Blokir Automatic Adjustement	Kepala Balai
			IKK 4.7a	Presentase Standarisasi Pengujian Kendaraan Bermotor	%	90	90	0	0%	Anggaran Kegiatan terkena Blokir Automatic Adjustement	Anggaran Kegiatan terkena Blokir Automatic Adjustement	Kepala Balai
4	SK5	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	95	95	13	14%	Capaian belum optimal dan Anggaran Kegiatan terkena Blokir Automatic Adjustement sehingga nominal Anggaran kegiatan menjadi Rp. 572.947.000	Optimalisasi percepatan pelaksanaan kegiatan Tugas Pokok dan Fungsi Ditjen Hubdat	Kepala Balai



5	SK6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	95	95	20.5	21%	Capaian Belum Optimal	Optimalisasi percepatan pelaksanaan layanan perkantoran (Operasional dan Pemeliharaan Kantor) dan Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Layanan Perkantoran (Gaji dan Tunjangan)	Kepala Balai
---	-----	---	---------	--	-------	----	----	------	-----	-----------------------	---	--------------



LAMPIRAN



RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III BANGKA BELITUNG

NO	SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN												ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	
							Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12			
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(21)	
1	SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IOK1.1	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Kapasitas Angkutan Jalan	%	100	Penyenggaraan Layanan Angkutan Jalan Prioritas Nasional	-	9%	18%	27%	36%	45%	54%	63%	72%	81%	90%	100%	Rp 6,246,193,000	Kepala Balai
			IOK1.2	Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan antarmoda	lokasi	2	Layanan Angkutan Multimoda Prioritas Nasional	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Rp 1,909,346,000	
			IOK1.3	Persentase pelaksanaan pelayanan keperluan angkutan penyeberangan	%	100	Penyenggaraan Layanan Angkutan Penyeberangan Prioritas Nasional	-	30%	35%	40%	55%	60%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	Rp 5,887,587,000	
			IOK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang dibangun	lokasi	2	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Baru	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Rp 85,915,120,000	
2	SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IOK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	Pelaksanaan Rampcheck Kapal Penyeberangan dan SPM Pelabuhan Penyeberangan	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%	100%	Rp 1,095,240,000	
			IOK2.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi	lokasi	4	Operasional Pelabuhan SDP yang dikelola	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
3	SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IOK4.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Prioritas Nasional	-	8.2%	15.0%	22.0%	35.0%	47.0%	57.0%	66.7%	75.0%	83.3%	91.7%	100%	Rp 13,476,480,000	
							Bantuan Teknik Perlengkapan Jalan Prioritas Nasional	-	8.2%	15.0%	22.0%	35.0%	47.0%	57.0%	66.7%	75.0%	83.3%	91.7%	100%	Rp 697,540,000	
			IOK4.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	orang	300	Penyenggaraan Pekan Nasional Keselamatan Jalan Prioritas Nasional	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	Rp 200,000,000	
			IOK4.7a	Persentase Standarisasi Pengujian Kendaraan Bermotor	%	90	Pelaksanaan Kalibrasi Alat Uji	-	10%	24%	32%	40%	48%	55%	62%	70%	77%	82%	90%	Rp 1,600,000,000	
4	SK5	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IOK3.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	nilai	95	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perhubungan Darat)	10	15	20	30	35	40	50	55	60	70	80	95	Rp 4,348,153,000	
5	SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IOK1	Tingkat Penyelenggaraan Penimbangan Diben Perhubungan Darat	nilai	95	Layanan Penimbangan (Operasional dan Pemeliharaan Kantor)	10	15	20	30	35	40	50	55	60	70	80	95	Rp 14,336,952,000	

Pangkalpinang, 2 Januari 2025
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas III Bangka Belitung


PITRA SETIAWAN, S.IP., M.Sc.
NIP 197909252006041001



MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III BANGKA BELITUNG
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Money renaksi Bulan :

Maret 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Realisasi				Realisasi Bulan-3		% Capaian Bulan-3		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran (Rp.)		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antar moda transportasi	Presentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan	%	100	Penyelenggaraan Layanan Angkutan Jalan Perintis Prioritas Nasional	Jumlah produksi per hari dan ritase	Layanan Angkutan Jalan Perintis Prioritas Nasional	100	100%	6,246,193,000	100%	10	-	10%	0%	Pengawasan Pelaksanaan kegiatan Bulan Maret	Persiapan pelaksanaan pelayanan dan pengawasan Bulan April serta Persiapan pembayaran bulan maret	
		Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda	lokasi	2	Penyelenggaraan Layanan Angkutan Antarmoda KSPN	Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda	Jumlah Layanan Angkutan Antarmoda KSPN Prioritas Nasional	2	100%	1,909,346,000	100%	2	-	100%	0%	Pengawasan Pelaksanaan kegiatan Bulan Maret	Persiapan pelaksanaan pelayanan dan pengawasan Bulan April serta Persiapan pembayaran bulan maret	
		Presentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan	%	100	Penyelenggaraan Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis Prioritas Nasional	Data Produksi Kapal dan Penumpang	Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis Prioritas Nasional	100	100%	5,887,587,000	100%	5	-	5%	0%	Pelaksanaan Pelayanan Bulan Januari (Penunjukan Langsung)	Persiapan pelaksanaan kontrak dan pelayanan Maret - Desember	
		Jumlah pelabuhan SDP yang dibangun	Lokasi	2	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Baru	Data Evaluasi Progres Pembangunan Bangunan Negara	Pengawasan operasional Pelabuhan SDP	2	100%	85,915,120,000	100%	0	-	0%	0%	Belum Tercapai	Persiapan pelaksanaan Kontrak	
2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	Pelaksanaan Rampcheck Kapal Penyeberangan dan SPM Pelabuhan Penyeberangan	Data Evaluasi hasil Pelaksanaan SPM Pelabuhan dan Rampcheck	Terpenuhinya SPM Kapal Penyeberangan	100	100%	1,095,240,000	100%	15	398,240,000	15.0%	36%	Pelaksanaan SPM di Bulan Maret dan Anggaran Kegiatan terkena Blokir Automatic Adjustment sehingga nominal Anggaran kegiatan menjadi Rp. 619.240.000	Pelaksanaan SPM di Bulan April - Desember	Kepala Balai
		Jumlah pelabuhan yang beroperasi	Lokasi	4	Operasional Pelabuhan SDP	Data Realisasi Pelabuhan SDP	Pengawasan operasional Pelabuhan SDP	4	100%			4		100%		Pelaksanaan Pengawasan Operasional Pelabuhan SDP Bulan Maret dan Anggaran Kegiatan terkena Blokir Automatic Adjustment sehingga nominal Anggaran kegiatan menjadi Rp. 619.240.000	Persiapan Pelaksanaan Pengawasan Operasional Pelabuhan SDP Bulan April	
3	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	Presentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan prioritas nasional	Data Fasilitas Perlengkapan Jalan	Terpasangnya perlengkapan jalan di lokasi yang sesuai dengan kebutuhan	50	100%	9,848,000,000	100%			0%	0%	Anggaran Kegiatan terkena Blokir Automatic Adjustment	Anggaran Kegiatan terkena Blokir Automatic Adjustment	
					Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan Prioritas Nasional	Data Fasilitas Perlengkapan Jalan	Terpasangnya perlengkapan jalan di lokasi yang sesuai dengan kebutuhan	25	100%	697,540,000	100%			0%	0%	Anggaran Kegiatan terkena Blokir Automatic Adjustment	Anggaran Kegiatan terkena Blokir Automatic Adjustment	
					Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Data Fasilitas Perlengkapan Jalan	Terpasangnya perlengkapan jalan di lokasi yang mendapatkan pemeliharaan perlengkapan jalan	25	100%	3,628,480,000	100%			0%	0%	Anggaran Kegiatan terkena Blokir Automatic Adjustment	Anggaran Kegiatan terkena Blokir Automatic Adjustment	
		Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan	orang	300	Penyelenggaraan Pekan Nasional Keselamatan Jalan Prioritas Nasional	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pekan Keselamatan Jalan	Tersosialisasinya masyarakat tentang keselamatan transportasi jalan	300	100%	200,000,000	100%			0%	0%	Anggaran Kegiatan terkena Blokir Automatic Adjustment	Anggaran Kegiatan terkena Blokir Automatic Adjustment	
4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Presentase Standarisasi Pengujian Kendaraan Bermotor	%	90	Pelaksanaan dan Pengawasan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Data Pengawasan Pengujian Kendaraan Bermotor	Terpenuhinya standarisasi pengujian kendaraan bermotor	90	100%	1,600,000,000	100%			0%	0%	Anggaran Kegiatan terkena Blokir Automatic Adjustment	Anggaran Kegiatan terkena Blokir Automatic Adjustment	
		Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	95	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perhubungan	Data Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Penyerapan Anggaran Kegiatan	Tersedianya Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran	95	100%	4,348,153,000	100%	19,00	125,200,821	20%	3%	Capaian belum optimal dan Anggaran Kegiatan terkena Blokir Automatic Adjsument sehingga nominal Anggaran kegiatan menjadi Rp. 572.947.000	Optimalisasi percepatan pelaksanaan kegiatan Tugas Pokok dan Fungsi Ditjen Hubdat	
5	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	95	Layanan Perkantoran (Operasional dan Pemeliharaan Kantor)	Data Pelaksanaan Operasional Kantor	Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan perkantoran	95	100%	6,479,664,000	100%	13,00	605,099,792	14%	9%	Capaian belum optimal dan Anggaran Kegiatan terkena Blokir Automatic Adjsument sehingga nominal Anggaran kegiatan menjadi Rp. 4.229.080.000	Optimalisasi percepatan pelaksanaan layanan perkantoran (Operasional dan Pemeliharaan Kantor)	
					layanan Perkantoran (Gaji dan Tunjangan)	Data Perkantoran	Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan perkantoran	95	100%	7,857,288,000	100%	28	2,316,664,827	29%	29%	Capaian belum optimal	Persiapan pelaksanaan kegiatan layanan perkantoran (Gaji dan Tunjangan)	



RENCANA KINERJA TAHUNAN

20 25

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bangka Belitung
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat





RENCANA KINERJA TAHUNAN
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III
Bangka Belitung Tahun 2025

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Rencana Kinerja Tahunan
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III
Bangka Belitung
Tahun 2025

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Muhammad Zinedine DH, A.Md.Tra	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi	01/2024 /12	
2.	Dikonsep	Regita Intan Permatasari, S. Tr. Tra	Penelaah Teknis Kebijakan	01/2024 /12	
3.	Diperiksa	Denny Megantoro, A.Md. LLASDP.	Pengelola Kepegawaian	01/2024 /12	
4.	Diperiksa	M. Fitra Setiawan, A.Md. LLASDP., S.M.	Pejabat Pembuat Komitmen II	01/2024 /12	
5.	Diperiksa	Wiratno, S.SiT., M.M	Pejabat Pembuat Komitmen I	01/2024 /12	
6.	Disetujui	Pitra Setiawan, S.IP., M.Sc	Kepala Balai	01/2024 /12	

RENCANA KINERJA TAHUNAN
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS III BANGKA BELITUNG TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
1	SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan	%	100
			IKK1.2	Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan antarmoda	Lokasi	2
			IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
			IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang Dibangun	Lokasi	2
2	SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP	%	100
			IKK 2.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4
3	SK4	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	IKK4.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
			IKK4.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	300
			IKK4.7a	Persentase Standarisasi Pengujian Kendaraan Bermotor	%	90

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
4	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	95
5	SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	95

Pangkalpinang, 01 Desember 2024
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas III Bangka Belitung



PITRA SETIAWAN, S.IP., M.Sc.
NIP 197909232006041001